

**ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING  
(PMA) DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI  
(PMDN) TERHADAP PENINGKATAN PDRB DI  
SULAWESI SELATAN**



OLEH :

**SURIYAH HARTATY**

Stb/Nim : 4595011013/9951110410277

**JURUSAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS "45"  
MAKASSAR  
2000**

# HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) TERHADAP PENINGKATAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI SULAWESI SELATAN

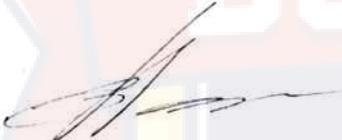
Nama Mahasiswa : SURİYAH HARTATY

Stb / Nirm : 4595011013 / 9951110410277

Jurusan : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

Program Studi : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

Pembimbing I Menyetujui : Pembimbing II

  
(Prof. Dr.H.A. Karim Saleh)

  
(Sukmawati Marjuni, SR, MSi)

Mengetahui dan Mengesahkan  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas "45" Makassar

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas "45"

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi  
dan Studi Pembangunan

  
(Sukmawati Marjuni, SR, MSi)

  
(Haeruddin Saleh, SR)

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Sabtu/30 September 2000  
Skripsi Atas Nama : SURIYAH HARTATY  
No. Stb/Nirm : 4595011013/9951110410277

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Studi Pembangunan.

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : DR. ANDI JAYA SOSE, SE, MBA (Rektor Univ. "45" Makassar) ( Jaya )
2. Ketua Panitia : SUKMAWATI MARDJUNI, SE, Msi ( Sukma )
3. Sekretaris : IRWAN, SE ( Irwan )
4. Penguji :
  1. SUKMAWATI MARDJUNI, SE, Msi ( Sukma )
  2. Dra. A. HIMAYAH TAHIR, Msi ( Himayah )
  3. THAMRIN ABDUH, SE ( Thamrin )
  4. HAERUDDIN, SE ( Haerudin )



## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT oleh karena limpahan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana wujudnya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam skripsi ini penulis membahas masalah Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sulawesi Selatan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari yang diharapkan, baik isi dari pembahasannya maupun teknik penulisannya. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki serta kurangnya literatur dan buku-buku pendukung lainnya. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis harapkan kritikan-kritikan dan masukan-masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak Prof.DR.H.A. Karim Saleh dan Ibu Sukmawati Marjuni SE, MSi masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, sejak persiapan

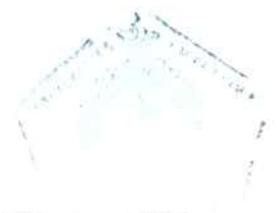
penelitian, penyusunan sampai selesainya skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan sembah sujud dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Ambo Sakka dan Ibunda Supini yang telah banyak berkorban dan senantiasa memanjatkan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan meraih Gelar Sarjana Ekonomi Pada fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar.

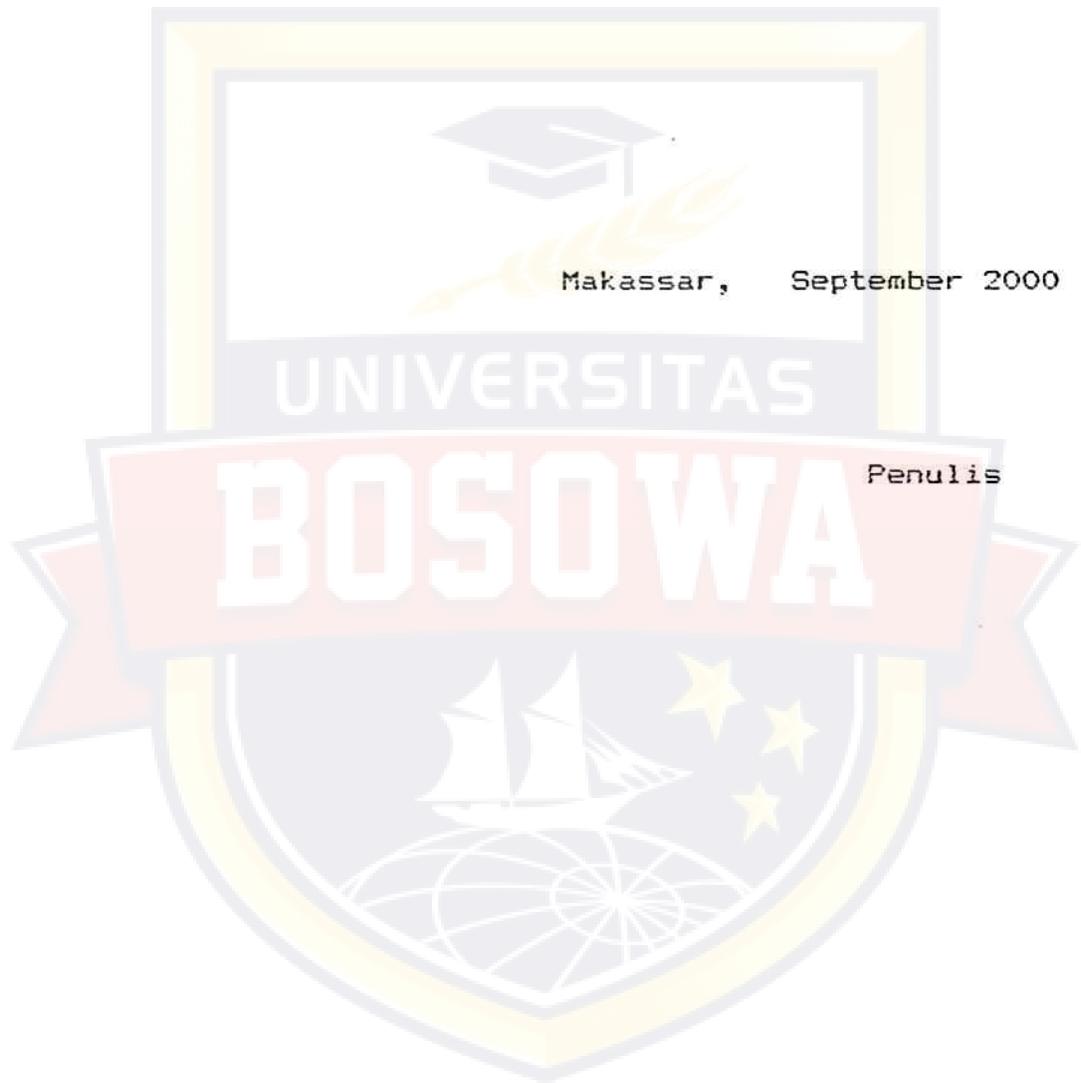
Ucapan terima kasih yang sama penulis sampaikan se-tinggi-tingginya kepada :

1. Bapak DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA sebagai Rektor Universitas "45" Makassar
2. Ibu Sukmawati Marjuni, SE, MSi, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar.
3. bapak Haeruddin Saleh, SE, Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen serta seluruh staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar.
5. Teman-teman yang telah mmberikan bantuan dan dukungan moril baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan kesemuanya itu, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga semua itu bernilai ibadah dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhana Wataala, Insya Allah.



Akhirnya marilah kita serahkan diri kepada Allah SWT  
semoga kita semua tetap berada dalam lindungan-Nya. Dan  
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa  
dan negara. Insya allah, Amin.



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PENERIMAAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalahan .....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1.4. Hipoteisis .....	5
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
2.1. Kebijakan Moneter, Suku Bunga dan pengeluaran Investasi .....	6
2.2. Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal Serta teori Pendapatan Keseimbangan Terhadap Investasi .....	11
2.3. Efek Kebijakan Moneter dan Investasi .....	16
2.4. Kebijakan Fiskal dan Investasi .....	18
2.5. Pinjaman dan Penanaman Modal Asing serta Penanaman Modal Dalam Negeri .....	20
2.6. Pokok-Pokok Kebijakan Penanaman Modal Peranan Koperasi Dalam Perekonomian .....	24
2.7. Pengertian Penanaman Modfal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) .....	27
2.8. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	32

<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
3.2. Jenis Dan Sumber Data .....	37
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.4. Metode Analisis .....	38
3.5. Konsep Operasional .....	39
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Perkembangan Penanaman Modal Asing .....	40
4.2. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri .....	50
4.3. Peranan PMDN di masa Mendatang.....	52
4.4. Tingkat Produktivitas Usaha PMDN dan PMA.....	57
4.5. Hubungan Antara Tingkat PMA dan PMDN dengan PDRB Sulawesi Selatan .....	63
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	72
5.2. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 1. TINGKAT INVESTASI PMA DAN PMDN DI SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 1995 - 1999 .....	3
TABEL 2. PERKEMBANGAN TINGKAT PMA DI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN PERIODE 1995 - 1999 .....	48
TABEL 3. TINGKAT PERKEMBANGAN PMDN DI SULAWESI SELATAN PERIODE 1995 - 1999 .....	56
TABEL 4. PRODUKSI INDUSTRI - INDUSTRI PMA DI SULAWESI SELATAN PERIODE 1995 - 1999 .....	60
TABEL 5. PRODUKSI INDUSTRI - INDUSTRI PMDN DI SULAWESI SELATAN PERIODE 1995 - 1999 .....	61
TABEL 6. PERKEMBANGAN PDRB SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 1995 - 1999 .....	66

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh semua negara di dunia ini meliputi banyak kegiatan yang kompleks, sehingga cara-cara yang ditempuh oleh negara maju sekarang ini dilaksanakan utamanya yang berkaitan pada pembangunan ekonomi dengan kegiatan investasi antar sektor tidak begitu saja dapat diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Selain itu negara-negara yang sudah maju sekarang ini mempunyai proses perkembangan yang berbeda dengan negara yang sedang berkembang.

Selain itu kurangnya sumber-sumber alam dan tenaga manusia menyebabkan pemerintah memegang peranan yang lebih penting dalam pembangunan ekonomi di negara belum maju daripada di negara-negara barat pada waktu permulaan perkembangannya. Lagi pula kurangnya sumber kapital dan perlunya penggunaan yang paling efisien dari sumber-sumber yang relatif sedikit menyebabkan perlu diadakan perencanaan ekonomi.

Tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang sangat tergantung pada sumber-sumber ekonomi yang dapat digunakan untuk investasi baik sumber-sumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Penggunaan sumber-sumber yang ada inipun menentukan

pula kecepatan laju perkembangan ekonomi terutama mengarah saat-saat dilaksanakannya investasi di antara sektor-sektor itu. Serta banyak pendapat mengenai prioritas untuk investasi pada sektor-sektor yang dianggap penting guna mendukung perkembangan dan pertumbuhan pembangunan ekonomi seperti sektor pertanian, industri berat, prasarana terutama transportasi dan tenaga listrik serta substitusi impor.

Pada umumnya telah diketahui bahwa kebijaksanaan yang diambil pemerintah negara sedang berkembang, baik itu merupakan kebijaksanaan moneter maupun fiskal, diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi di negara tersebut. Sehingga masalah yang dirumuskan dalam kebijaksanaan fiskal dan moneter adalah menentukan cara/alat yang paling efektif guna mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan dalam rencana pembangunan ekonomi.

Berdasarkan pada kenyataan yang dapat dilihat bahwa negara sedang berkembang termasuk Indonesia hanya mempunyai sejumlah kapital yang relatif sedikit bila dibandingkan dengan kebutuhan pembangunannya, maka perlu untuk mendatangkan modal dari negara-negara yang lebih maju. Untuk itu diperlukan beberapa cara untuk mendapatkan devisa sebagai kapital yang dapat digunakan sebagai dana dalam melaksanakan pembangunan, di antaranya adalah :

- Dengan mengekspor barang-barang ke luar negeri
- Dengan menarik pinjaman atau kredit dari luar negeri

- Dengan bantuan ataupun hadiah yang didapat negara tersebut dari negara lain
- Dengan menarik kapital asing untuk diinvestasikan di dalam negeri

Untuk mengetahui perkembangan investasi yang dilakukan oleh PMA dan PMDN di daerah Sulawesi Selatan selama 5 tahun yakni tahun 1995 - 1999 maka ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1  
TINGKAT INVESTASI PMA DAN PMDN  
DI SULAWESI SELATAN PERIODE  
TAHUN 1995 - 1999

Tahun	Jumlah Investasi			
	PMA	Investasi (Rp)	PMDN	Investasi (Rp)
1995	12	38.231.456.980	13	42.804.388.024
1996	13	39.950.801.825	13	42.804.388.024
1997	15	41.850.021.560	17	56.784.233.450
1998	9	26.760.261.410	17	56.784.233.450
1999	10	28.145.351.890	15	43.189.415.040

Sumber Data : - Kantor BKPM Sulawesi Selatan  
- Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan

Sesuai dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh penanaman modal baik yang dilakukan investor asing dan investor dalam negeri terhadap peningkatan PDRB di Sulawesi Selatan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul : "ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) TERHADAP PENINGKATAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI SULAWESI SELATAN".

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Seberapa besar pengaruh penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terhadap peningkatan PDRB di Sulawesi Selatan.

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) yang ada di Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terhadap peningkatan PDRB di Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dalam rangka merumuskan kebijaksanaan yang dapat menunjang peningkatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Badan Penanaman Modal Nasional (BPMN) daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, guna berusaha untuk menarik minat para investor dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan serta mempermudah urusan yang menyangkut penanaman modal (investasi) baik untuk bidang industri, jasa maupun pertanian (perkebunan).

### 1.4. H i p o t e s i s

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah pokok, maka rumusan hipotesis ini adalah sebagai berikut :

- Diduga bahwa ada hubungan yang erat dan signifikan antara pengaruh penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terhadap peningkatan PDRB di Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan".

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 2.1. Kebijakan Moneter, Suku Bunga dan Pengeluaran Investasi

Secara umum dapat dikatakan bahwa pengeluaran investasi dapat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dari pada pengeluaran konsumsi. Pengaruh penurunan tingkat suku bunga atas pengeluaran konsumsi nampaknya tidak begitu besar.

Pengaruh perubahan tingkat suku bunga terhadap pengeluaran investasi lebih besar dari pada pengaruhnya atas pengeluaran konsumsi, karena besarnya serta jangka waktunya yang panjang menyangkut pemberian barang-barang modal untuk investasi. Pembelian peralatan kapital berupa mesin-mesin produksi serta peralatan-peralatan lain, bangunan pabrik, gudang, persediaan dan lain-lain merupakan pembelian atau pengeluaran dalam jumlah sangat besar. Biaya bunga atas kapital yang dipinjam untuk membeli barang kapital sangatlah besar. Kenaikan tingkat suku bunga dapat mengikuti pengeluaran investasi dan peralatan kapital (mesin-mesin produksi) ke penanaman dana deposito, karena hal ini akan lebih menarik dan lebih menguntungkan. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa perubahan tingkat suku bunga terutama akan mempengaruhi pengeluaran investasi dan selanjutnya pada tingkat out put, kesempatan kerja dan tingkat harga.

Oleh karena itu suatu perubahan tingkat harga umum yang diukur dengan indeks harga atau angka laju inflasi akan menyebabkan perbedaan nilai variabel pada harga yang berlaku dan nilainya pada harga konstan, terutama dalam hubungannya dengan variabel pendapatan dan produk total nasional. Proses pendeflasian dengan menggunakan angka laju inflasi perlu dilakukan. Dalam hal ini dikenal konsep tingkat suku bunga nominal dan tingkat suku bunga riil. Tingkat suku bunga nominal (uang) yang tinggi sering kali disertai dengan terjadinya atau dialaminya laju inflasi tinggi pula. Sehingga pembayaran kembali pinjaman atau kredit yang diambil guna membiayai investasi yang dilakukan menjadi tinggi, di mana nilai uang telah mengalami penurunan.

Sehingga tingkat suku bunga akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi seperti yang lebih dikemukakan sebelumnya, dengan asumsi tak terjadi inflasi atau angka laju inflasi adalah nol. Apabila terjadi inflasi maka besarnya hasil pendapatan yang diperoleh dari investasi tidaklah konstan setiap tahunnya, tetapi akan menjadi besar sesuai dengan besarnya angka inflasi. Untuk menghilangkan efek distorsi dari adanya inflasi terhadap pendapatan hasil investasi dan pada tingkat suku bunga, maka permintaan investasi dapat dianalisis dengan mempertimbangkan efek output riil dan output riil dan output suku bunga riil terhadap pengeluaran investasi.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tingkat suku bunga merupakan determinan yang menentukan pengeluaran investasi. Namun ada beberapa determinan lainnya yang mempengaruhi investasi, sebagai berikut :

a. Biaya perubahan barang modal serta biaya pemeliharaan dan pengoperasiannya.

Biaya pembelian barang modal, biaya pemeliharaan dan pengoperasiannya jelas merupakan hal penting yang menentukan tingkat keuntungan bersih yang diharapkan dari kegiatan investasi. Bila biaya-biaya ini naik maka tingkat keuntungan bersih yang diharapkan dari kegiatan investasi akan turun.

b. Pajak perusahaan

Dalam mengadakan investasi, para pengusaha melihat dan mempertimbangkan besarnya keuntungan yang diharapkan sesudah pajak. Kenaikan pajak perusahaan akan menurunkan tingkat keuntungan bersih yang diharapkan dan cenderung akan menurunkan minat untuk investasi. Hal ini sebaliknya terjadi bila ada penurunan pajak perusahaan.

c. Perubahan teknologi

Kemajuan teknologi misalnya berupa pengembangan produk-produk baru, perbaikan produk-produk yang ada, penemuan mesin-mesin baru atau proses produksi baru merupakan pendorong untuk mengadakan investasi. Penemuan mesin yang lebih efisien akan menurunkan biaya produksi atau menghasilkan perbaikan kualitas yang selanjutnya akan

menaikkan tingkat keuntungan bersih yang diharapkan dari investasi pada mesin tersebut.

d. Banyaknya barang kapital yang dimiliki atau dipegang

Bila terdapat cukup banyak barang modal atau fasilitas produksi serta persediaan barang-barang jadi, maka investasi akan mengalami penurunan atau hambatan. Hal ini karena pada industri tersebut telah tersedia cukup banyak peralatan produksi yang mampu memenuhi permintaan sekarang maupun dimasa depan.

e. Ekspektasi keuntungan

Barang-barang kapital merupakan barang-barang tahan lama yang digunakan dalam proses produksi selama beberapa tahun. Keuntungan tergantung kepada penjualan produk yang diproduksi oleh barang modal tersebut di masa depan. Perkiraan bisnis dapat dilakukan dengan cara sangat sederhana atau dengan menggunakan metode canggih di dasarkan pada kondisi bisnis di masa depan dengan memasukkan sejumlah indikator bisnis. Faktor-faktor ini sangat tak menentu hingga sukar diramalkan, misalnya situasi atau iklim politik, pertumbuhan penduduk, hubungan ekonomi luar negeri, kondidi pasar, dan lain-lain yang harus dipertimbangkan serta dianalis secara subyektif dan intuitif. Situasi optimistik yang meliputi dunia usaha mengenai kondisi bisnis di masa depan akan meningkatkan investasi itu sendiri.

Meskipun pengeluaran investasi merupakan komponen pengeluaran agregatif yang lebih kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran konsumsi, tetapi sifat pengeluaran investasi yang tidak stabil merupakan penyebab utama fluktuasi tingkat produksi dan pendapatan.

Faktor-faktor berikut ini merupakan hal penting yang menyebabkan variabilitas pengeluaran atau permintaan investasi, yaitu :

a. Ketahananlamaan barang-barang kapital dan variasi ekspektasi sepanjang waktu

Ketahananlamaan menyebabkan pembelian barang-barang kapital dapat ditunda sampai suatu batas waktu tertentu. Peralatan produksi lama dapat diganti sebagian atau sepenuhnya, atau masih tetap digunakan untuk beberapa tahun kemudian. Ekspektasi yang optimistik oleh dunia usaha akan situasi bisnis dimasa depan akan mendorong mereka mengganti atau memodernisasi peralatan-peralatan produksi mereka. Hal ini jelas akan menaikkan investasi dan begitu pula sebaliknya. Ekspektasi dunia usaha sangat bervariasi dari waktu ke waktu.

b. Ketidakteraturan inovasi

Seperti telah diketahui, kemajuan teknologi merupakan faktor utama penentu pengeluaran investasi. Penemuan sumber-sumber atau seperti penemuan tambang mineral, penemuan produk-produk baru dan kesempatan investasi kecil lainnya. Semuanya ditemukan secara teratur saat

kejadiannya.

#### c. Variabilitas keuntungan

Dunia usaha mengadakan investasi hanya bila menguntungkan. Hal ini sampai sejauh tertentu dipengaruhi oleh besarnya keuntungan yang diperoleh karena bagian produksi merupakan bagian yang cukup besar investasi yang dibutuhkan, yang dilakukan atau dibiayai dari keuntungan, sehingga variabilitas atau fluktuasi keuntungan akan mempengaruhi fluktuasi besarnya investasi yang dilakukan.

## 2.2. Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal Serta Teori Pendapatan Keseimbangan terhadap Investasi

Teori penentuan output dan pendapatan serta kesempatan kerja keynesian dan kebijakan stabilitas ini terdiri dari dua kebijakan yaitu : Kebijakan moneter dan fiskal.

Apabila diperhatikan lebih seksama, maka titik kunci dari kedua kebijakan tersebut adalah: tingkat output, kesempatan kerja, pendapatan dan tingkat harga yang semuanya langsung berhubungan dengan tingkat permintaan agregatif. Keputusan sektor perusahaan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang menggunakan sumber-sumber tergantung pada jumlah atau besarnya uang yang dibelanjakan atau dikeluarkan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Tiga komponen pengeluaran agregatif tersebut

adalah sebagai berikut:

a. Konsumsi

Tingkat pengeluaran konsumsi tergantung pada posisi skedul konsumsi dan tingkat pendapatan setiap konsumsi atau tingkat produk nasional netto. Seperti telah dikemukakan, skedul pengeluaran konsumsi cukup stabil.

Perubahan besarnya pengeluaran konsumsi merupakan reaksi terhadap perubahan konsumsi secara pasif mengikuti perubahan pendapatan nasional bersih. Selanjutnya lereng skedul konsumsi marginal merupakan faktor penentu besarnya angka pengganda pendapatan.

b. Investasi

Pengeluaran investasi merupakan permintaan agregatif yang tidak stabil dan karena itu merupakan sebab terjadinya fluktuasi tingkat output, kesempatan kerja dan tingkat harga. Hal ini karena faktor yang mempengaruhi bersifat tidak stabil yaitu kepercayaan untuk berusaha yang berubah-ubah, kemajuan teknologi yang terjadinya sangat tidak teratur dan sifat tahan lama dari barang-barang kapital memungkinkan menunda pembeliannya.

Disamping itu tingkat keuntungan yang diharapkan merupakan pertimbangan dan sumber terpenting dalam keputusan investasi sangat bervariasi.

c. Pengeluaran pemerintah

Komponen permintaan agregatif berupa pengeluaran pemerintah ditentukan oleh kebijaksanaan atau kepentingan

masyarakat, tidak seperti komponen pengeluaran agregatif lainnya yaitu konsumsi dan investasi yang merupakan keputusan pihak atau sektor swasta untuk kepentingannya sendiri, keputusan pengeluaran pemerintah dibuat untuk kepentingan masyarakat umum yaitu mencapai tingkat output dan kesempatan kerja yang stabil dan tinggi.

Kebijaksanaan fiskal menunjukkan pada perubahan pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak yang dilaksanakan untuk menghilangkan "lokal inflator" maupun "lokal resesi". Kemampuan komponen pengeluaran pemerintah sebagai salah satu komponen pengeluaran agregatif yang secara langsung mempengaruhi tingkat output, kesempatan kerja dan tingkat harga. Sementara itu kebijaksanaan yang menyangkut perpajakan akan mempengaruhi secara tidak langsung pengeluaran konsumsi dan investasi. Penurunan pajak pendapatan akan menggeser skedul konsumsi ke bawah.

Sedangkan penurunan pajak keuntungan perusahaan perseorangan atau perorangan akan menaikkan keuntungan, merangsang investasi dan menggeser kurva permintaan investasi ke atas. Sebaliknya kenaikan pajak perseroan atau perusahaan perorangan akan menurunkan keuntungan dan selanjutnya menurunkan keinginan mengadakan investasi. Kebijakan fiskal merupakan manipulasi tingkat pengeluaran pemerintah dari tingkat pengenaan atau struktur pajak oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun ada kelemahannya, namun kebijaksanaan moneter mempunyai kelebihan berupa fleksibilitas dan dapat lebih diterima secara politis karena bersifat tidak langsung dari pada kebijaksanaan fiskal yang bersifat langsung. Selain itu kaum moneteris bahkan menyatakan bahwa penanaman uang atau kebijaksanaan moneterlah yang merupakan faktor kunci penentu tingkat kegiatan ekonomi. Dalam melaksanakan kebijaksanaan perlu diperhatikan faktor non ekonomis dan sektoral serta komoditi startegis. Selain itu, meskipun kebijaksanaan fiskal moneter yang harus diambil arahnya jelas tetapi dosis serta koordinasi dua kebijaksanaan tersebut sukar ditentukan.

Meskipun model kebijaksanaan ini menunjukkan bekerjanya determinan-determinan penting serta faktor yang mempengaruhinya, maka hal itu juga cukup menentukan tingkat keseimbangan serta mekanisme bekerja kebijaksanaan moneter dan fiskal sebagai upaya manajemen kegiatan ekonomi untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tanpa inflasi, namun beberapa hal berikut dapat mempengaruhi mekanisme pelaksanaan kebijaksanaan moneter dan inflasi. Hal-hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor non ekonomis dan faktor sektoral atau komoditi strategis. Kebijakan pemerintah baik berupa pengeluaran dan perpajakan tidak hanya ditujukan untuk mencapai stabilitas ekonomi makro berupa pemeliharaan tingkat kegiatan ekonomi pada kesempatan kerja penuh tanpa

inflasi, tetapi juga untuk pemeratakan distribusi pendapatan.

- b. Kuantifikasi dan koordinasi kebijaksanaan fiskal dan kebijaksanaan moneter.

Arah kebijaksanaan moneter dan fiskal biasanya dengan mudah dapat ditentukan. Dalam suasana resesi maka kebijaksanaan yang tepat adalah kebijakan defisit APBN dan kebijakan uang longgar. Namun tak dapat diketahui dengan tepat seberapa besar defisit yang diperlukan. Ini menyakitkan usaha manajemen untuk tetap memelihara tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja penuh dengan stabilitas harga. Selain itu meskipun efek kebijaksanaan moneter dan fiskal dapat dipisahkan namun kenyataannya keduanya saling berhubungan dan harus dikoordinasikan, dimana pengaruh penurunan pajak dan tergantung apakah hal ini diikuti dengan perubahan penukaran uang dan tingkat suku bunga. Hal ini karena dengan terjadinya kenaikan produksi dan pendapatan, maka penukaran akan uang naik dan dengan penukaran uang yang tertentu, tingkat suku bunga akan naik. Kenaikan suku bunga akan menurunkan atau mengurangi volume investasi swasta. Jadi efek ekspansi pendapatan akibat penurunan pajak sebagian diimbangi oleh penurunan volume investasi swasta akibat adanya kenaikan tingkat suku bunga. Karena itu efek ekspansi penurunan tingkat suku bunga harus diikuti dengan kenaikan penukaran uang untuk menjaga agar ting-

kat suku bunga tetap tak berubah. Kesimpulan efek kebijaksanaan fiskal tidak berpisah dari efek kebijaksanaan moneter, keduanya harus dikoordinasikan agar diperoleh efek stabilitas yang efektif.

Oleh karena itu efektivitas mekanisme kebijaksanaan moneter ada kelemahannya, bersifat tak simetris antara kebijaksanaan uang ketat. Kebijakan uang ketat akan lebih efektif dilakukan oleh sistem bank umum dalam kontraksi moneter. Tetapi dalam kebijaksanaan uang longgar, efek ekspansi moneternya tergantung pada reaksi sistem bank umum untuk merealisasikannya. Sedangkan kombinasi kebijaksanaan fiskal moneter hanya efektif ditetapkan pada kasus inflasi akibat adanya dorongan upah. Tingkat suku bunga tak akan efektif pengaruhnya terhadap investasi, hal ini karena banyak faktor lain yang mempengaruhi pengeluaran investasi disamping tingkat suku bunga. Selain itu perusahaan mempunyai investasinya dari dana internal berupa keuntungan yang tak dikonsumsi atau tak dibagikan.

### 2.3. Efek Kebijakan Moneter dan Investasi

Penciptaan uang yang beredar dilakukan oleh otoritas moneter yaitu bank sentral dan pemerintah. Sepanjang otoritas tersebut melaksanakan fungsi-fungsi moneternya, sementara bank-bank umum menciptakan uang giral, tanpa sepengetahuan dan pengendalian oleh otoritas moneter, bank-bank umum yang mempunyai motif mencari keuntungan dalam kegiatan

pemberian kredit akan menyebabkan fluktuasi kegiatan ekonomi tak terkendalikan. Bank-bank umum cenderung menciptakan uang lebih banyak pada masa inflasi dan tak cukup menciptakan uang giral pada waktu resesi hingga lebih memperburuk situasi ekonomi.

Untuk itu tujuan kebijaksanaan moneter haruslah dirumuskan secara spesifik yaitu menciptakan kesempatan kerja bagi faktor-faktor produksi sehingga dicapai tingkat output kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Kebijakan moneter merupakan kebijaksanaan dengan menggunakan piranti-piranti guna mempengaruhi dan mengatur penanaman uang atau sejumlah uang beredar dengan tujuan menstabilkan harga dan output total dan kesempatan kerja jangka pendek, serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan kata lain, kebijaksanaan moneter akan menaikkan atau menambah jumlah uang beredar selama perekonomian mengalami resesi dan kemandegan untuk merangsang pengeluaran, dan sebaliknya membebani dan mengurangi suplay uang selama masa-masa inflasi guna mengerem pengeluaran.

Rantai urutan efek kebijaksanaan moneter berupa perubahan sejumlah uang beredar terhadap kegiatan ekonomi yang menunjukkan proses kebijaksanaan yang menunjukkan proses kebijaksanaan yang dijalankan guna mencapai tujuan. Mula-mula otorita moneter menetapkan kebijaksanaan moneter menetapkan kebijaksanaan moneter sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai melalui berbagai piranti/teknik kebijaksanaan moneter yang dipilih. Bank sentral sebagai pelaksana

kebijakan dapat mempengaruhi besarnya cadangan aktual dan cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank-bank umum dan juga cadangan kelebihan dengan menggunakan piranti kebijaksanaan yang telah dipilih tersebut.

Seperti telah diketahui bahwa pengeluaran investasi merupakan fungsi atau dipengaruhi oleh tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan pengeluaran oleh pihak swasta terutama keputusan pengeluaran investasi yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat output, kesempatan kerja, pendapatan dan tingkat harga.

#### 2.4. Kebijakan Fiskal dan Investasi

Kebijakan fiskal yang dimaksudkan adalah perubahan besarnya pajak dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan menstabilkan harga serta tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Dimana kebijakan fiskal ini mempunyai dua instrumen yaitu : perubahan pengeluaran pemerintah (G) dan penarikan pajak (T) dengan anggapan bahwa :

- a. Skedul investasi independen atau tidak dipengaruhi oleh besarnya (G) dan (T).
- b. Pengeluaran pemerintah tidak menyebabkan perubahan pengeluaran konsumsi atau investasi sektor swasta.
- c. Besarnya pajak yang dipungut tidak berhubungan atau independen terhadap tingkat NNP (Pendapatan Nasional Bruto)

Adapun beberapa macam pengeluaran pemerintah serta pajak dan dampaknya terhadap efek inflator dan efek deflator (anti inflasi) atas surplus atau defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pada dasarnya pengeluaran pemerintah mempunyai efek pengganda dan merangsang kenaikan NNP (Pendapatan Nasional Bersih) yang lebih besar dari pada pembayaran transfer dalam jumlah sama. Pengeluaran pemerintah ini akan menaikkan pendapatan dan produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, karena pengeluaran pemerintah hanya menaikkan permintaan agregatif. Oleh karena itu pengeluaran pemerintah secara langsung akan menaikkan produksi bila perekonomian belum mencapai keadaan kesempatan kerja penuh, karena pengeluaran tersebut hanya menaikkan permintaan agregatif didasarkan anggapan bahwa pengeluaran pemerintah tidaklah pada proyek-proyek yang menghalangi atau menggantikan investasi sektor swasta.

Olehnya itu pengambilan kebijaksanaan fiskal oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara diharapkan untuk menanggulangi inflasi dan ekspansi pengeluaran dapat dilakukan secara drastis dengan kebijaksanaan anggaran belanja seimbang. Prinsip anggaran seimbang ini telah diterapkan dengan ketat untuk menanggulangi inflasi spiral yang tinggi, bersama-sama dengan kebijaksanaan moneter berupa pengrematan laju penambahan uang beredar serta pemberian kredit yang diarahkan untuk tujuan sama.

Sebelumnya kebijaksanaan anggaran defisit dan sistem ekonomi yang tidak merangsang produksi telah menimbulkan inflasi menuntut kenaikan pengeluaran lebih besar dan pada gilirannya akan menaikkan laju inflasi.

## 2.5. Pinjaman dan Penanaman Modal Asing Serta Penanaman Modal Dalam Negeri

Masalah kekurangan dana untuk pembentukan modal bukan hanya dihadapi oleh sektor pemerintah tetapi juga oleh sektor swasta. Di negara-negara berkembang, kegiatan ekonomi yang dapat diusahakan oleh pihak swasta masih mempunyai kemungkinan untuk berkembang lebih maju lagi, apabila tersedia lebih banyak modal dan terdapat kemampuan untuk menggunakan tambahan modal itu secara lebih efektif. Seperti juga yang terjadi di sektor pemerintah, masalah tersebut dapat diatasi dengan memasukkan modal dari luar negeri, terutama dari negara-negara maju. Walaupun mempunyai peran yang sama seperti bantuan luar negeri yang diterima oleh sektor pemerintah, modal luar negeri yang digunakan untuk mengisi kekurangan modal di sektor swasta tidak boleh digolongkan sebagai bantuan luar negeri. Ini disebabkan karena syarat-syarat pinjaman swasta dan penanaman modal asing di negara-negara berkembang adalah sama dengan yang berlaku di pasar internasional. Apabila modal tersebut berupa pinjaman maka tingkat bunganya adalah tidak berbeda dengan tingkat bunga yang berlaku dalam pasar internasio-

nal. Dan apabila modal tersebut berupa penanaman modal, maka keuntungan yang akan diperoleh adalah bebas untuk dikirimkan kembali kenegara-negara asal modal tersebut, yaitu sesuai dengan cara pembayaran keuntungan yang pada umumnya dilakukan ke atas penanaman modal asing di negara-negara maju. Berdasarkan kepada hal ini dapatlah dikatakan bahwa umumnya pihak swasta di negara-negara maju meminjamkan dan menanamkan modalnya ke negara-negara berkembang bukan atas dasar keinginan untuk membantu tetapi untuk memperoleh keuntungan dari padanya. Oleh karena aliran modal tersebut, walaupun membantu negara-negara berkembang mengatasi kekurangan tabungan dan mata uang asing berarti pula memegang peranan yang sama seperti penanaman modal asing dan tidak dapat dipandang sebagai bantuan luar negeri.

Akan tetapi agar partisipasi masyarakat semakin meningkat di dalam pembangunan, maka peranan dunia usaha nasional perlu lebih ditingkatkan. Untuk itu pemerintah perlu melanjutkan usaha dalam pengembangan dan pembinaan dunia usaha nasional. Maksudnya agar terjadi pemerataan usaha serta kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi dan usaha swasta.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dibutuhkan adanya dana. Dalam hal ini salah satu cara pemerintah adalah mengadakan pengarahannya para penanam modal, khususnya modal swasta nasional.

Penanaman modal swasta nasional ini diatur melalui UU. No. 6 Tahun 1969 yaitu tentang penanaman modal dalam negeri. Mekanisme kerja pelaksanaan penanaman modal dalam negeri diatur oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Dimana BKPM mengeluarkan daftar Skala Prioritas (DSP) tentang proyek-proyek, kemudian dijalankan dengan modal swasta nasional.

Oleh karenanya BKPM daerah mempunyai kewajiban untuk meninjau pelaksanaan penanaman modal yang dikaitkan dengan masalah-masalah pokok di bidang pembangunan, yang menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat adalah peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan dan pemerataan kegiatan pembangunan maupun pemerataan dari pada hasil-hasil pembangunan adalah hal yang sangat penting dalam rangka menggairahkan kegiatan penanaman modal untuk masa-masa datang.

Untuk itu dapatlah kita uraikan kewajiban, tugas dan tujuan dari pembentukan BKPM, yaitu :

1. Maksud dan tujuan dari pada pembentukan BKPM daerah sebagai lembaga yang melakukan koordinasi pengelolaan penanaman modal di daerah. Dalam uraian tersebut mencakup pula proses komunikasi konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan penanaman modal. Dimana perlu adanya umpan balik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan para penanam modal atau masyarakat di daerah pada umumnya agar iklim penanaman modal dapat diciptakan sebaik-baiknya.

2. Kebijakan pokok penanaman modal yang pada dasarnya ditujukan pada penciptaan iklim pengembangan penanaman modal dengan prinsip-prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud meliputi keseimbangan dalam pengertian mengenai fasilitas penanaman modal, keseimbangan dalam kemampuan berusaha antara pengusaha nasional dan asing, serta kaitannya dengan program Indonesianisasi dan keseimbangan dalam pengelolaan potensi penanaman modal dengan lingkungan hidup.
3. Kesempatan pengembangan penanaman modal berhubungan dengan telah berakhirnya resesi dunia. Kesempatan untuk meningkatkan kegiatan ekspor dan penggunaan dana luar negeri untuk peningkatan kegiatan penanaman modal di dalam negeri merupakan dua hal yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan dan menciptakan lapangan kerja.
4. Pola hubungan golongan ekonomi lemah dengan golongan ekonomi kuat perlu pula dikembangkan sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam pengembangan penanaman modal. Tujuan adalah jelas yaitu agar diperoleh satu pola kerja sama saling bergantung, sehingga perkembangan ekonomi yang ada benar-benar membuka kesempatan baru bagi pengembangan usaha dan dihayati bersama oleh semua golongan ekonomi dan bukan sebaliknya.

## 2.6. Pokok - Pokok Kebijakan Penanaman Modal

Didalam melaksanakan kebijaksanaan penanaman modal yang dilakukan oleh para investor dengan koordinasi pemerintah dan BKPM maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

### 1. Prinsip keseimbangan dalam pengembangan dunia usaha

Pelaksanaan prinsip keseimbangan ini merupakan realisasi dari pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Oleh-nya itu akan membantu menciptakan iklim pengembangan penanaman modal di masa mendatang. Sebagai langkah pertama perlu dipahami secara seimbang makna dari pada pemberian fasilitas penanaman modal. Sebagai pendorong penanaman modal disatu pihak dan penyelenggaraan prasarana dan fasilitas lainnya yang dibangun pemerintah dengan menggunakan dana yang diperoleh dari penerimaan negara dilain pihak. Dalam rangka menunjang prinsip keseimbangan, maka peningkatan kemampuan ekonomi nasional perlu diselenggarakan sebagai langkah untuk mendapatkan keseimbangan peranan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan penanaman modal. Dalam rangka ini program Indonesianisasi yang merupakan pula peningkatan peranan investor Indonesia dalam PMA campuran perlu memperhatikan aspek-aspek pemilikan modal, keahlian teknik, manajemen dan ketenagakerjaan. Termasuk dalam perinsip keseimbangan di sini adalah penggunaan bahan-bahan (baku) yang telah dapat dihasilkan di dalam negeri.

Dalam rangka pengembangan usaha/penanaman modal ini akan lebih efektif jika dapat dipahami adanya kebijaksanaan yang telah diambil pemerintah dengan berbagai pendekatan kelembagaan dan penyelenggaraan sebagai fasilitas-fasilitas yang menunjang

## 2. Pengarahan penanaman modal melalui daftar prioritas

Kebijaksanaan penanaman modal merupakan bagian dari pada kebijaksanaan pembangunan. Di Dalam PJP I secara kuantitatif ditetapkan target peningkatan produk nasional bruto yang terdiri dari peningkatan pada sektor pertanian, industri, pertambangan, bangunan, pengangkutan, dan lain-lain. Di dalam target yang dicanangkan tersebut, peranan swasta diperhitungkan baik dalam rangka peningkatan tabungan masyarakat dan tabungan perusahaan sebagai dana yang dimobilisir untuk pembangunan dan dari peningkatan investasi swasta itu sendiri. Untuk mencapai target-target tersebut pemerintah menyelenggarakan pembangunan prasarana dan kegiatan-kegiatan menciptakan iklim usaha yang menunjang, sedang sektor swasta perlu diarahkan dengan memperhatikan prioritas pembangunan disatu pihak dan segi-segi yang menyangkut kegiatan usaha itu sendiri. Sebagaimana diketahui pada pelaksanaan pembangunan ditetapkan prioritas antara lain : peningkatan produksi, pemberian lapangan kerja, pemerataan kegiatan pembangunan ke daerah dan pemerataan hasil pembangunan. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut dalam

daftar skala prioritas penanaman modal ditetapkan 4 kategori yaitu : prioritas, fasilitas, terbuka tanpa fasilitas dan tertutup. Penetapan empat kategori tersebut ditinjau secara priodik untuk diadakan penyesuaian menurut keadaan daerah yang bersangkutan.

### 3. Pengembangan penanaman modal dengan menggunakan lembaga pengelola

Pembentukan beberapa lembaga pengelolaan penanaman modal sampai saat ini dimaksudkan untuk menunjang program peningkatan penanaman modal. BPKM merupakan lembaga yang dapat membantu dunia usaha memperoleh fasilitas penanaman modal. Dalam fungsinya lembaga ini dapat memberikan informasi, promosi, memproses aplikasi dan memecahkan permasalahan penanaman modal yang timbul.

Di bidang fiskal pemberian-pemberian perangsang penanaman modal diselenggarakan menurut tingkat keperluan fasilitas dalam rangka mendorong penanaman modal, yaitu:

- a. Pada tahap pendirian PT., berupa fasilitas pemulihan dan pembebasan bea materai modal
- b. Pada tahap pembangunan pabrik dan gudang, berupa fasilitas pengimporan bahan baku
- c. Pada tahap usaha tingkat pertama, berupa fasilitas pajak perseorangan dan sebagainya.

## 2.7. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Dewasa ini telah semakin meluas disadari negara-negara berkembang bahwa penanaman modal dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga kepada pembangunan ekonomi. Terutama yang menyangkut penanaman modal asing, apabila ditinjau dari segi ini maka penanaman modal baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun asing akan mempertinggi tingkat penanaman modal dan selanjutnya mempercepat tingkat pembangunan ekonomi. Selain itu pula penanaman modal baik asing maupun dalam negeri bukan saja menyediakan modal yang diperlukan untuk penanaman modal yang direncanakan, tetapi juga membawa bersama tenaga manajemen, keahlian usahawan keahlian teknik dan pengetahuan mengenai pasar serta pemasaran dari barang-barang yang dihasilkan. Dan didalam jangka panjang penanaman modal dapat melatih golongan pribumi mendapatkan keahlian dalam bidang-bidang yang diusahakan oleh para peranan modal. Dan juga perusahaan-perusahaan tersebut dapat mempercepat proses pengenalan teknologi baru yang digunakan oleh industri-industri tersebut.

### 2.7.1. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)

Sejak dekade 1970-an telah banyak dipermasalahkan mengenai tujuan pembangunan dapat dicapai dan bagaimana peranan perusahaan asing dalam pembangunan Indonesia. Baik ditinjau dari segi modal, teknologi dan berbagai keahlian yang ada pada penanaman modal asing secara teori maupun

praktek memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pembangunan.

Indonesia telah merasakan betapa pentingnya peranan PMA tersebut dibidang minyak, pertambangan dan kehutanan. Hal mana ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan ekspor negara yang berasal dari sumber-sumber tersebut. Akan tetapi banyak hal yang masih menjadi masalah khususnya mengenai hubungan antara tujuan pembangunan dengan peranan PMA.

Teori yang dapat dipelajari dari hubungan antara negara penerima modal asing dengan PMA sendiri mempunyai banyak variasi, teori pertama menunjukkan sikap ekstrim tidak menginginkan timbulnya ketergantungan dengan menolak kehadiran modal asing karena dianggapnya sebagai kelanjutan dari proses kapitalisme (Marx dan Magdoff). Kedua berupa teori nasionalisme dan populisme yang pada dasarnya meliputi kekhawatiran akan dominasi modal asing dan melihat pembagian keuntungan yang tidak seimbang yang terlalu banyak ada pada pihak PMA, sehingga menjadi sebab negara menerima modal untuk membatasi kegiatan PMA.

Menurut pendapat Hymer yang dikemukakan menyangkut PMA ini lebih banyak dipengaruhi oleh Marxis berpendapat sebagai berikut:

"PMA dengan prinsip pemupukan modal yang cenderung sebagai perluasan dari kapitalisme dan menuju pada pengembangan imperialisme".

Sedangkan untuk Indonesia secara umum mendefinisikan PMA sesuai kuadrat dan kondisi di Indonesia sebagai berikut:

"Perusahaan yang memiliki atau menguasai fasilitas produksi dan jasa di luar negara di mana mereka berkedudukan".

Berdasarkan dari pengertian di atas mengenai PMA maka dapat disimpulkan bahwa: pertama, PMA belum dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan kedua, pembahasan yang intensif untuk mengatur kegiatan PMA secara tuntas dan terpadu belum nampak, seperti halnya telah dilakukan di negara lain.

Adapun yang menjadi perhatian dari bentuk-bentuk dari usaha PMA yang ada di Indonesia pada dasarnya dapat berupa:

1. Perusahaan cabang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan PMA induknya.
2. Perusahaan subsidiary, yang merupakan perusahaan yang berbadan hukum sendiri. Di mana saham perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induknya.
3. Perusahaan patungan, yang merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh dua atau lebih perusahaan sebagai partner.
4. Bentuk lainnya yang pembentukannya didasarkan pada ketentuan perundangan yang ada, seperti dibidang perbankan, pertambangan minyak dan gas bumi serta perdagangan/jasa lainnya.

Semenjak kegiatan PMA semakin intensif, kesadaran negara-negara penerima modal mulai bangkit, terutama dipengaruhi oleh keadaan politik, sosial budaya, tingkat perkembangan ekonomi, keadaan potensi sumber alam dan strategi pembangunan nasional masing-masing negara. Sikap negara penerima modal dalam mengambil langkah-langkah untuk menghadapi PMA berbeda antara yang satu terhadap yang lainnya. Akan tetapi kecendrungan umum dapat kita lihat dari 5 hal sebagai berikut:

1. Sikap pemerintah terhadap aliran masuknya modal
2. Monitoring terhadap pelaksanaan PMA dan pengalihan teknologi yang umumnya semakin ketat.
3. Perlakuan yang lebih bersifat pengembangan usaha nasional yang semakin meningkat.
4. Keharusan melapor/mendaftar kepada pemerintah.
5. Larangan pengambilan usaha lokal oleh pihak asing

#### 2.7.2. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Usaha pengembangan PMDN telah dirintis sejak sebelum lahirnya Undang-Undang PMDN, yaitu berupa kebijaksanaan pembangunan dan penyertaan modal pemerintah dan kemudian disesuaikan dengan ke dalam kebijaksanaan kredit investasi. Oleh karenanya pengaruh penggunaan dana tersebut untuk pemberian kredit kepada proyek didasarkan kepada prioritas pembangunan pemerintah. Sehingga Undang-Undang PMDN merupakan hal yang penting, tidak hanya dari sudut kepentingan para pengusaha nasional, tetapi juga dari sudut kepentingan

negara/pemerintah khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, di mana peranan swasta secara lebih efektif sangat diharapkan.

Hal ini dapat kita ketahui berdasarkan pendapat Apter (1992 : 176) di dalam buku yang disadur oleh Sumanoro yang menyatakan bahwa :

"Dunia ini merupakan suatu arena pembangunan, dimana peranan penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu diantara sekian banyak kekuatan yang berusaha mengidentifikasi bentuk organisasi, pola pengambilan keputusan dan cara pendekatannya untuk mencapai tujuan usahanya".

Pengamatan Apter ini memang merupakan pokok-pokok kesan dari pada letak masalah yang sebenarnya dalam hubungan antara PMDN dengan pemerintah negara bersangkutan. Di mana pendapat di atas pemberian asumsi bahwa permasalahan yang menyangkut PMDN di suatu negara sangat tergantung pada gerak perkembangan ekonomi dunia dan dari usaha PMDN itu sendiri.

Oleh itu peranan perusahaan PMDN itu juga sangat diharapkan untuk pemerataan penyebaran kegiatan ke daerah-daerah. Di mana dalam pelaksanaannya diperuntukkan bagi proyek-proyek yang eksekutif dan dapat diharapkan, namun untuk proyek-proyek yang lainnya perusahaan PMDN lebih menyukai menanamkan modalnya di daerah Jawa dan beberapa kota di luar Jawa. Hal ini antara lain di dorong oleh sifat perusahaan yang memerlukan fasilitas sarana dan prasarana

serta prospek pemasarannya yang dapat dipenuhi di kota-kota besar.

Kegiatan perusahaan PMDN disebut telah menunjukkan hasil dan telah memberikan manfaat bagi negara yaitu berupa pembangunan/pengelolaan sumber-sumber alam, pengembangan industri, pembukaan prasarana perhubungan, termasuk pembangunan pelabuhan, tenaga listrik, yang keseluruhan mempunyai pengaruh pada pembangunan nasional/daerah yang bersangkutan. Sudah tentu termasuk juga peningkatan keahlian tenaga kerja dan modernisasi kegiatan ekonomi dapat dicapai secara lebih cepat dari pada kegiatan perusahaan tersebut.

Dasar-dasar untuk pengembangan dan pembinaan industri-alisasi telah banyak ditunjang oleh kegiatan perusahaan PMDN tersebut. Seperti pengembangan industri kimia dan produk-produk dari minyak telah menumbuhkan kegiatan industri-industri lainnya.

Atas dasar itu pemerintah senantiasa mengharapkan adanya perusahaan PMDN untuk dapat melakukan investasi-investasi ke daerah-daerah dan mengharapkan agar pelaksanaan kegiatan-kegiatannya memenuhi kepentingan masyarakat, pemerintah dan perusahaan itu sendiri.

## 2.8. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peningkatan pendapatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah pad PDRB daerah tersebut. Menurut laporan kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi

Sulawesi Selatan, pengertian PDRB adalah seluruh nilai netto barang dan jasa (komoditi) yang diproduksi pada suatu wilayah domestik/regional tanpa memperhatikan pemilikan faktor-faktor produksinya.

Untuk menghitung pendapatan nasional dengan menentukan dan menjumlah nilai produksi yang diciptakan oleh setiap sektor produksi yang ada dalam perekonomian. Sektor-sektor produksi tersebut dapat dibedakan atas sebelas (11) sektor produksi sebagai berikut: Sektor pertanian, pertambangan dan galian, industri pengolahan listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan, perhotelan dan rumah makan, transportasi dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah, pemerintah dan pertahanan serta jasa-jasa lainnya. Untuk menyederhanakan perhitungan maka ke-11 sektor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 sektor, yaitu : sektor pertanian, jasa dan investasi. Jadi untuk menghitung pendapatan nasional/regional dengan cara produksi, yang pertama harus dilakukan adalah menentukan nilai produksi yang tercipta dalam sektor-sektor tersebut di atas. Nilai yang diperoleh dinamakan Produk Domestik Regional Bruto, jika ruang lingkup adalah regional (propensi) maka nilai yang diperoleh dinamakan PDRB. Selanjutnya dijumlahkan dengan nilai produk tambahan yang tercipta. Dengan cara ini dapat terhindar berlakukanya perhitungan dua kali dan juga akan menunjukkan sumbangan yang sebenar-benarnya dari tiap sektor yang dihitung. Sebab dalam menciptakan produksi

disetiap sektor menggunakan input dari sektor lainnya dan ini dapat berupa bahan mentah, alat-alat produksi, dan lain-lain, sehingga nilai produksi yang dipasarkan oleh suatu sektor tidak sepenuhnya merupakan produksi sektor tersebut, di mana sebagian dari produksinya merupakan produksi dari sektor lainnya.

Berdasarkan pada metode di atas, maka pendapatan nasional dan regional dapat dihitung dengan melakukan penjumlahan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa selama setahun.

Dengan demikian PDRB adalah seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Sulawesi Selatan tanpa memperhatikan apakah faktor-faktor produksinya berasal atau dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut atau tidak.

Ada 3 konsep mengenai PDRB, yaitu:

1. Dari segi produksi adalah nilai jumlah netto produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Sulawesi Selatan dalam jangka waktu tertentu (besarnya satu tahun).
2. Dari segi pendapatan adalah jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di wilayah Sulawesi Selatan dalam jangka waktu tertentu (biasanya waktu yang digunakan adalah satu tahun).
3. Dari segi pengeluaran adalah jumlah yang dikeluarkan untuk konsumsi rumah, konsumsi lembaga yang tidak mene-

rima keuntungan, pengeluaran untuk investasi dari ekspor netto di wilayah tersebut untuk jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Beberapa metode yang digunakan untuk menghitung PDRB adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Langsung

Dalam metode ini ada 3 cara pendekatan yang digunakan yaitu:

- a. pendekatan produksi
- b. Pendekatan pendapatan
- c. Pendekatan pengeluaran

#### 2. Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini, perhitungan dilakukan dengan mengalokasikan PDRB atau nilai tambah dari sektor dan sub sektor/komoditi/kegiatan usaha dalam skop nasional/multi regional ke dalam angka regional dengan menggunakan indikator yang tepat.

Adapun manfaat dari PDRB dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan daerah
2. Sebagai indikator dalam pertumbuhan ekonomi
3. Dapat mengetahui kadar pertumbuhan pendapatan nasional, pendapatan perkapita dan struktur ekonomi di suatu daerah

4. Dapat merupakan indikator hubungan antara sektoral
5. Dapat mengetahui sektor usaha.
6. Mencari dan mengetahui potensi sumber-sumber pembiayaan pembangunan di luar sektor yang ada sekarang.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk kelancaran penulisan skripsi ini, maka penulis mengambil/menentukan lokasi penelitian di daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dengan waktu penelitian selama kurang lebih 60 (enam puluh) hari.

#### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Untuk menunjang kegiatan skripsi ini, maka data yang diperlukan adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui cara wawancara langsung dengan para pegawai dan pejabat pemerintah daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan kegiatan-kegiatan pengambilan data, yang antara lain berasal dari :
  - a. Kantor Pemerintah Tingkat I Sulawesi Selatan
  - b. Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
  - c. Kantor Statistik daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
  - d. Sumber-Sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penulisan ini, maka teknik yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### 1. Interview

Teknik ini dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara langsung dengan pegawai dan pejabat pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tingkat I Sulawesi selatan.

#### 2. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan, ini dimaksudkan untuk memperoleh data langsung dari responden guna keperluan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

### 3.4. Metode Analisis

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terhadap peningkatan PDRB di Sulawesi Selatan maka digunakan rumus Regresi Linier Berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

$Y$  = PDRB Sulawesi Selatan (Rp)

$a$  = Konstanta

$X_1$  = Jumlah penanaman modal dalam negeri (Rp).

$X_2$  = Jumlah penanaman modal asing (Rp)

$b_1, b_2$  = Koefisien Elastisitas

$e$  = Kesalahan pengganggu (tingkat kesalahan)

Dengan jenis pengujian :  $R^2$ , " Uji F" dan " Uji T".

### 3.5. Konsep Operasional

Dalam penulisan skripsi ini, akan dibahas variabel - variabel pokok yang digunakan untuk mendukung dan memberikan arah serta pengertian yang jelas dalam pembahasan. Adapun kerangka operasionalnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- PDRB Sulawesi Selatan adalah seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Sulawesi Selatan tanpa memperhatikan apakah faktor-faktor produksinya berasal atau dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut atau tidak.
- PMA adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta asing terhadap suatu negara.
- PMDN adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta nasional dalam suatu negara.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Perkembangan Penanaman Modal Asing

Perkembangan ekonomi pada umumnya dan PMA khususnya telah menjadi perhatian kalangan masyarakat pada umumnya. Perkembangan tersebut membuka kesempatan baru bagi masyarakat untuk melakukan usaha disuatu pihak, tetapi juga membawa problema baru bagi usaha yang ada. Perkembangan ekonomi sebagai hasil pembangunan PJP I telah membawa perubahan struktur prioritas pembangunan pada PJP II dengan skop perhatian kepada aspek-aspek yang lebih luas baik secara vertikal maupun secara horisontal.

Dari hasil perkembangan PMA sampai akhir PJP I, maka menjelang dan saat pelaksanaan PJP II tampak ada tuntutan untuk meningkatkan partisipasi pihak nasional dalam kegiatan penanaman modal asing tersebut, peningkatan partisipasi ini sejalan dengan pemerataan kegiatan pembangunan serta aspek penyebaran hasil kegiatan tersebut ke daerah-daerah. Keseluruhan telah menjadi prioritas pembangunan PJP II.

Gejala terutama pengikut sertaan golongan nasional ke dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya di lingkungan suatu negara, tetapi juga di lingkungan Internasional. Hal ini terbukti dari munculnya masalah tata ekonomi Internasional baru, dimana peranan negara-negara produsen minyak meningkat secara cepat dalam perekonomian

dunia, sedangkan kelompok negara sedang berkembang muncul dalam kancah kegiatan pengelolaan kehidupan dunia baik yang beraspect ekonomi maupun politik.

Dalam tata ekonomi Internasional baru bahkan negara sedang berkembang yang tidak mempunyai sumber alam maupun dasar untuk industrialisasi juga menuntut juga berperan dalam tatanan baru tersebut. Letak kekuatan mereka justru pada kedudukannya yang peka dalam tata ekonomi yang baru tersebut yang dapat mempunyai efek terhadap tata ekonomi tersebut, karena hubungan ekonomi dunia saling berkaitan erat.

Pada PJP II menetapkan prioritas, antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan/pemerataan pendapatan serta penyebaran kegiatan ekonomi di daerah-daerah. Pada PJP II dikenal adanya beberapa jenis kelompok usaha yang masing-masing mempunyai kekhususan yang berlainan, yaitu perusahaan swasta asing, swasta pribumi, swasta non-pribumi dan perusahaan pemerintah. Peranan PMA diarahkan pada sektor dimana kemampuan dan faktor produksi yang mereka bawa masih belum dimiliki oleh perusahaan-perusahaan nasional. Kegiatan modal asing diarahkan untuk menjadi penunjang dalam usaha pengembangan dunia usaha nasional. Dalam pengerahan tersebut perlu dicegah adanya persaingan yang tidak sehat antara perusahaan - perusahaan tersebut. Untuk keperluan tersebut oleh pemerintah disusun daftar skala prioritas penanaman modal. Di dalam daftar

tersebut terdapat ketentuan mengenai sesuatu usaha tertutup untuk modal asing. Demikian juga secara implisit ditetapkan bahwa usaha joint venture (perusahaan gabungan) perlu diselenggarakan dengan menjamin peningkatan peranan pihak nasional dalam pemilikan saham, manajemen, dan tenaga kerja.

#### 4.1.1. Dasar-Dasar daripada Penanaman Modal Asing

Dasar hukum mengenai penyertaan modal nasional dalam PMA telah dicantumkan dalam UU PMA adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan - ketentuan dalam pasal 3.
2. Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerjasama antara modal asing dengan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang dan jasa-jasa.

Sedangkan pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

1. Perusahaan tersebut pada pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbalan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Jikalau partisipasi termasuk dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penjualan saham yang telah ada, maka

hasil penjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan.

Walaupun ketentuan tersebut belum tegas, namun demikian kebijaksanaan pengendalian saham yang dilancarkan pemerintah sekarang menjurus kepada penguasaan secara mayoritas oleh pihak nasional dapat dipahami. Jika kita lihat perkembangan PMA, pada tahap-tahap pertama pemerintah mengundangnya sebagai pioner dengan menawarkan berbagai fasilitas serta dengan menciptakan iklim dan kondisi yang menarik bagi PMA. Pada tahap berikutnya setelah sekian lama PMA menikmati fasilitas-fasilitas, pemerintah menetapkan kebijaksanaan antara lain dengan mengketatkan syarat PMA dan mensyaratkan untuk membuka partisipasi modal nasional. Kebijaksanaan tersebut dikemukakan pada tanggal 22 Januari 1974 dan yang kemudian pokok-pokoknya dituangkan dalam PJP I. Kebijaksanaan tersebut dengan demikian dapat dipahami sebagai suatu proses kemajuan dan sebagai konsekuensi perkembangan ekonomi itu sendiri.

Olehnya itu pengetahuan program PMA terutama menyangkut pemilikan saham telah ditetapkan dalam bentuk Surat Edaran BKPM yang pada intinya merupakan pelaksanaan dari pada pasal 27 UU PMA yaitu penegasan mengenai jangka waktu dan perimbangan partisipasi saham nasional, serta penetapan waktu mulainya suatu perusahaan asing dikenakan program Indonesia. Langkah-langkah pengaturan tersebut dirasakan belum cukup, yang paling pokok adalah belum terselenggara-

nya pengaturan mengenai kewajiban membuka partisipasi Indonesia dalam bentuk undang-undang yang lebih tegas dan menyeluruh dari pada pasal 27 tersebut di atas. Perlunya peraturan undang-undang tersebut adalah karena UU merupakan dasar hukum pokok untuk selanjutnya dapat diikuti dengan peraturan penyelenggaraannya yang menyangkut aspek-aspek : Penyusunan daftar skala prioritas penanaman modal, program pengketatan persyaratan PMA dan pengaturan mengenai pasar modal dan sebagainya.

Dalam praktek yang selama ini telah dilaksanakan program pengalihan saham masih merupakan masalah intern perusahaan yang pada dasarnya ditentukan oleh para pihak pemegang saham. Dalam akte pendirian perusahaan atau dalam perjanjian pembentukan joint venture belum dijumpai ketentuan yang memuat keharusan meningkatkan penyertaan pihak Indonesia sampai minimum 51%. Pada sejumlah perusahaan PMA memang membuka kesempatan partisipasi namun dalam pelaksanaannya sering dikaitkan dengan persyaratan-persyaratan yang sulit dipenuhi oleh pengusaha nasional, yang jelas adalah bahwa proses tersebut tergantung pada kondisi masing-masing perusahaan, misalnya dengan mengemukakan bahwa pelaksanaan program ini akan diselenggarakan setelah selesai pelunasan utang dari partner asing.

Berhubungan dengan itu maka pengaturan yang lengkap tersebut di atas sangatlah diperlukan. Tanpa pendekatan demikian akan sulit diharapkan PMA bersedia menanam modal-

nya dimana mereka diharuskan mengalihkan saham-saham kepada pihak nasional menjadi mayoritas. Sedang dilain pihak investasinya belum seluruhnya kembali atau belum memberikan keuntungan yang memadai. Dilihat dari sini maka pembatasan 10 tahun dari perusahaan yang memerlukan waktu pembangunan lama, mungkin dirasakan berat, sedang bagi sektor PMA lainnya yang cepat menghasilkan tidak dirakan berat. Namun penetapan jangka waktu tersebut sebenarnya membawa konsekwensi bagi pihak nasional yaitu berupa kemampuan partner nasional meningkatkan sahamnya sampai mayoritas dalam waktu tersebut.

#### 4.2.1. Kekhususan daripada Bidang Indonesianisasi Menurut Sektor Penanaman Modal

Bidang penanaman modal yang menarik modal asing, pertama adalah dibidang usaha ekstratif seperti dibidang pertambangan dan kehutanan. Dan selanjutnya dibidang industri yang mengarahkan kepada tujuan-tujuan pemasaran, tersedianya bahan baku dan tenaga kerja yang murah.

Di bidang pertambangan kegiatan PMA - diadakan antara penanaman modal di bidang tambang minyak dan gas bumi dengan bidang tambang lainnya. UU No 8 tahun 1971 mengenai Pertamina ditetapkan sebagai lembaga pengelola tambang minyak dan gas bumi. Dalam wewenangnya Pertamina dapat menyelenggarakan kontrak production Sharing dengan kontrak-tor asing. Ketentuan tentang Indonesianisasi dalam pemili-

kan saham dalam bidang ini tidak menjadi permasalahan karena modal asing bekerja atas bentuk kontrak dan hasil dari pada kontrak diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oleh karenanya maka berbagai fasilitas penanaman modal di bidang ini diberikan oleh pemerintah.

Kebijaksanaan PMA dibidang pertambangan non minyak dan gas bumi tercantum dalam UU pokok pertambangan No 11/67. Di dalamnya diatur kemungkinan pengikutsertaan modal asing Pasal 10 dari UU tersebut menyatakan bahwa:

1. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor, apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
2. Dalam mengadakan perjanjian kerja dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Instansi pemerintah atau perusahaan negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh menteri.
3. Perjanjian kerja tersebut dalam ayat (2) pasal ini, mulai berlaku sesudah disahkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR, apabila menyangkut eksplorasi golongan a, sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 UU ini dan atau yang perjanjian kerjanya berbentuk PMA.

Olehnya itu pendekatan yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan PMA adalah dengan menyediakan fasilitas yang memadai, dilatar belakangi oleh perlunya pelaksanaan program itu agar lebih didukung dan diarahkan, agar sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan prioritas pelaksanaan PJP II. Pertimbangan pemberian fasilitas dapat diselenggarakan kepada PMA yang menjual sahamnya dan menanam kembali hasilnya di Indonesia suatu pihak dan kepada masyarakat pembeli saham dilain pihak. Jumlah fasilitas dapat dipertimbangkan sesuai dengan jumlah saham yang ditawarkan serta jangka waktu pemenuhan persyaratan 51% mayoritas partisipasi nasional dapat diselenggarakan. Dalam rangka ini juga dipertimbangkan kesesuaian jenis-jenis proyek PMA tersebut dengan prioritas pembangunan yang ada.

Indonesianisasi PMA merupakan kebijaksanaan yang tepat. Tidak ada satupun PMA pun yang menentang kebijaksanaan ini dan bahkan merasakan bahwa kebijaksanaan tersebut sebagai hal yang sewajarnya. Namun pelaksanaan program ini diperlukan persiapan dan pendekatan yang tepat meliputi aspek yang luas.

Untuk melihat sejauh mana perkembangan PMA di daerah Tingkat I Sulawesi Selatan pada priode tahun 1995 - 1999 maka hal ini dapat diketahui pada tabel 2 di bawah ini :

TABEL 2  
PERKEMBANGAN TINGKAT PMA DI DAERAH TINGKAT I  
SULAWESI SELATAN PERIODE 1995 - 1999

Tahun	Jumlah PMA (unit)	Kenaikan (%)	Nilai Investasi (Rp)	Kenaikan (%)
1995	12	-	38.231.456.980	-
1996	13	8,33	39.950.801.825	4,50
1997	15	15,38	41.850.021.560	4,75
1998	9	-40	26.760.261.410	-36,06
1999	10	11,11	28.145.351.890	5,18

Sumber Data : - Kantor BKPM Daerah Tk I. Sulawesi Selatan  
- Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan

Berdasarkan dari tabel 2 di atas, dapat diketahui perkembangan jumlah PMA yang dilalukan oleh investor luar negeri di daerah Tingkat I Sulawesi Selatan pada priode tahun 1995 - 1999 sebagai berikut :

Pada tahun 1995 jumlah PMA di daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sebanyak 12 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 38.231.456.980, di tahun 1996 jumlah PMA yang dilakukan oleh investor asing di daerah Tingkat I Sulawesi Selatan meningkat sebesar 8,33% atau mencapai jumlah sebanyak 13 unit sedangkan untuk nilai investasinya meningkat sebesar 4,50% dengan mencapai jumlah sebesar Rp. 39.950.801.825. Sedangkan pada tahun 1997 jumlah PMA yang ada di daerah ini tetap mengalami peningkatan sebesar 15,38% atau mencapai jumlah 15 unit usaha dan nilai investasinya mencapai jumlah sebesar Rp. 41.850.021.560 atau meningkat sebesar 4,75%

dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 1998 jumlah investasi yang berasal dari PMA mengalami penurunan, dimana jumlah PMA yang ada di daerah Sulawesi Selatan hanya mencapai 9 unit usaha atau menurun sebesar -40% dengan nilai investasi yang hanya mencapai jumlah sebesar Rp. 26.760.410 atau menurun sebesar -36,06%. Demikian pula pada tahun 1999 jumlah PMA yang ada di daerah Sulawesi Selatan apabila dibandingkan dengan tahun 1997 tetap mengalami penurunan, namun dibandingkan dengan tahun 1998 maka PMA pada daerah ini mengalami peningkatan sebesar 11,11% atau mencapai 10 unit usaha dan nilai investasinya sebesar Rp. 28.145.351.890 atau meningkat sebesar 5,18%.

Apabila kita melihat secara keseluruhan, maka tingkat perkembangan PMA yang dilakukan oleh investor asing mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun ke tahunnya. Walaupun pada tahun 1998 jumlah PMA yang ada pada Daerah Sulawesi Selatan mengalami penurunan secara besar. Penurunan investasi yang dilakukan oleh investor asing ini disebabkan oleh adanya gejolak kritis ekonomi yang dialami oleh Indonesia, di mana terjadi perbedaan nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar mata uang negara lainnya yang menyebabkan investor merasa kurang baik untuk melakukan investasi. Dan juga adanya keadaan politik yang kurang stabil di negar kita, yang mengakibatkan investor yang ada menarik dan membekukan usahanya untuk sementara waktu menunggu keadaan menjadi stabil kembali.

#### 4.2. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri

Sebagaimana negara-negara sedang berkembang pada umumnya, Indonesia telah menetapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan modal dari luar negeri sendiri, dengan memanfaatkan investor-investor pribumi maupun non pribumi guna melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Harapan ini tertuang dalam UU PMDN dan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang penanaman modal. Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa PMDN dapat berperan dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan produksi, memberi perluasan lapangan kerja, menggali sumber-sumber potensi ekonomi di dalam negeri. Secara keseluruhan PMDN diharapkan dapat ikut serta/berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya.

Sehingga pelaksanaan kegiatan usaha dari perusahaan tersebut jelas dapat ikut meratakan pembagian pendapatan, memberi kesempatan kerja, memperluas kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan dan berusaha serta penyebaran kegiatan-kegiatan ke daerah-daerah. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana pengaturan pengarahannya dapat diselenggarakan secara mantap.

Di dalam GBHN yang merupakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan, kita dapati ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap modal, baik dari dalam negeri maupun asing. Tetapi kita belum melihat telah adanya perhatian pada kegiatan penanaman modal yang

bercorakkan perusahaan. Dalam arah pembangunan jangka panjang di GBHN dikemukakan antara lain, bila selama Indonesia memiliki sendiri faktor-faktor tersebut maka dapat dimanfaatkan potensi-potensi modal dalam negeri, modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri dalam bentuk joint venture sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional. Penjabaran arah pembangunan jangka panjang tersebut, kita dapat perumusan-perumusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pembiayaan yang terutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri, sedangkan sumber-sumber dari luar negeri merupakan sumber pelengkap. Kebijakan dalam bidang pasar modal ditingkatkan untuk pemerataan pemilikan usaha dan sekaligus meningkatkan penggalan sumber pembiayaan di dalam negeri.

Olehnya itu PMDN ditinjau dari historisnya sangat menonjol dalam permasalahan permodalan (kapital) yang dimiliki. Demikian pula dalam tahap-tahap perkembangan pelaksanaan selanjutnya. Sebagaimana diketahui penerbitan UU PMA merupakan cermin perubahan dari politik pemerintah di bidang ekonomi umumnya dan modal asing khususnya. Modal asing diperlukan sebagai faktor komplementer dari kekurangan modal nasional untuk memperkembangkan perekonomian Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya aliran modal asing cukup menggembirakan. Namun hal tersebut menimbulkan ketidakpuasan para pihak pengusaha - pengusaha Indonesia,

karena tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Dan jika diingat pada tahun 1970-an justru dunia industri dalam negeri dan usaha-usaha lainnya mengalami kemunduran yang hebat, maka kekhawatiran dari dunia pengusaha Indonesia akan dominasi pihak asing dapat dimengerti, maka dari itu diundangkannya UU PMDN merupakan hal yang penting, tidak hanya dari sudut kepentingan para pengusaha nasional yang memang sudah lama menentukan UU tersebut, tetapi juga dari sudut kepentingan negara/pemerintah khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan jangka panjang, di mana peranan swasta secara aktif sangat diharapkan.

Usaha pengembangan PMDN ini, mulai dirintis sejak sebelum ditetapkannya UU PMDN, yaitu hanya kebijaksanaan penggunaan dana penyertaan modal pemerintah dan kemudian disesuaikan ke dalam kebijaksanaan kredit investasi. Pada tahap tahun-tahun pertama dana untuk kredit tersebut digunakan juga dana anggaran yang disalurkan melalui perbankan. Oleh karenanya pengarahannya penggunaan dana tersebut untuk pemberian kredit kepada proyek yang didasarkan pada prioritas pembangunan pemerintah.

#### 4.3. Peranan PMDN di Masa Mendatang

Di dalam pelaksanaan PJP II telah dicantumkan adanya rencana pengembangan dunia usaha. Pengembangan ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dan penyempurnaan program sebelumnya. Pengembangan di sini bersifat menyeluruh yaitu

meliputi pengembangan perusahaan swasta nasional, perusahaan negara, perusahaan asing dan kepada golongan ekonomi lemah yang mendapat perhatian yang cukup besar.

Kebijaksanaan di bidang penanaman modal mencakup bidang pengaturan teknis dan pengarahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha, peningkatan penyebaran kegiatan penanaman modal ke daerah membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi tenaga Indonesia dan penggarapan potensi investasi yang ada. Berdasarkan atas kebijaksanaan tersebut telah diambil langkah-langkah antara lain penetapan daftar skala prioritas penanaman modal, pengaturan mengenai Indonesianisasi tenaga kerja, serta menciptakan iklim yang lebih mendorong penanaman modal.

Pada dasarnya skala tersebut di tetapkan ke dalam 4 kategori, yang pertama adalah proyek-proyek yang prioritas, untuk diberikan fasilitas penanaman modal yang cukup baik. Ke dua adalah kategori-kategori proyek-proyek fasilitas yaitu proyek-proyek penanaman modal yang tidak masuk prioritas, untuk itu maka penanaman modal di bidang ini diberikan perangsang penanaman modal. Kategori ketiga adalah proyek-proyek yang masih terbuka tanpa fasilitas yaitu proyek penanaman modal yang boleh dilakukan tetapi sifatnya tidak begitu penting peranannya bagi pembangunan maka tidak diberikan fasilitas. Kategori keempat adalah tertutup, yaitu tidak diperkenankan ada kegiatan penanaman modal di

bidang-bidang tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan keempat kategori tersebut pembangunan pemerintah, adalah segi-segi kejenuhan, penyebaran penanaman modal ke daerah-daerah penggunaan tenaga kerja yang besar, peningkatan peranan PMDN yang perlu dilakukan guna memberikan perlindungan kepada pengusaha lemah, peningkatan ekspor, penghematan devisa dan pengembangan dunia usaha selanjutnya.

Sehingga kegiatan peningkatan penyertaan modal nasional/pribumi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan pihak nasional, kemampuan lembaga-lembaga keuangan (khususnya lembaga-lembaga keuangan bukan bank) dalam membantu peningkatan penyertaan tersebut, serta pertimbangan besarnya investasi, tingkat teknologi dan resiko yang diperlukan untuk proyek-proyek PMDN.

Sedangkan usaha untuk meningkatkan penyebaran penanaman modal ke daerah, terutama yang menyangkut permasalahan pengarahan dan fasilitas yang dapat diharapkan sangat menentukan. Dipandang dari segi penanaman modal, maka program penyebaran tersebut akan membawa bermacam-macam pertimbangan yang perlu diperhatikan agar pengarahan ini dapat memenuhi sasaran. Di antara pertimbangan - pertimbangan tersebut adalah :

- Pemasaran (arah, potensi dan lokasinya)
- Masalah perhubungan dan angkutan/prasarana pada umumnya

- Masalah bahan baku
- Masalah tenaga kerja

Pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat tercermin dalam besarnya penanaman modal, jenis dan tingkat teknologi yang diperlukan. Pemikiran mengenai ini perlu diselenggarakan secara sungguh-sungguh, sebab adalah sulit memaksa pihak swasta untuk menanamkan modalnya di daerah tanpa mendapatkan kepastian hasil usahanya.

Untuk mendukung penyebaran penanaman modal ke daerah, diperlukan data dan informasi mengenai daerah tersebut secara terperinci sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas bagi para investor. Hal lain yang mendukung penyebaran penanaman modal ke daerah adalah dengan menggarap potensi penanaman modal yang ada di daerah.

Dalam hubungan ini, maka tugas promosi penanaman modal menjadi sangat penting. Karena dalam tugasnya mencakup pemikiran yang menyeluruh mengenai potensi penanaman modal di daerah-daerah, tingkat kemampuan pengusaha yang dapat diharapkan menanam modalnya di daerah serta pemikiran mengenai strategi pembangunan prasarana yang menunjang peningkatan, penyebaran dan penggarapan potensi penanaman modal di daerah.

Berdasarkan atas cara pendekatan yang dijelaskan di atas, maka penetapan prioritas penanaman modal menurut sektor dan yang mempunyai kaitan dengan pengembangan penanaman modal selanjutnya perlu dikembangkan. Olehnya itu

daftar data prioritas penanaman modal dapat digunakan sebagai alat untuk pengarahan penanaman modal yang perlu diselenggarakan secara lebih terperinci.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat perkembangan penanaman modal yang dilakukan oleh PMDN pada daerah tingkat I Sulawesi Selatan untuk periode tahun 1995 sampai tahun 1999, maka hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 3  
PERKEMBANGAN TINGKAT PMDN DI DAERAH TINGKAT I  
SULAWESI SELATAN PERIODE 1995 - 1999

Tahun	Jumlah PMDN (unit)	Kenaikan (%)	Nilai Investasi (Rp)	Kenaikan (%)
1995	13	-	42.804.388.042	-
1996	13	0	42.804.388.024	0
1997	17	30,77	56.784.233.450	32,66
1998	17	0	56.784.233.450	0
1999	15	-11,76	43.189.415.040	-23,94

Sumber Data : - Kantor BKPM Daerah Tk I. Sulawesi Selatan  
- Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan

Berdasarkan data dari tabel 3 di atas, maka dapat diketahui tingkat perkembangan PMDN yang dilakukan oleh investor nasional/pribumi pada daerah tingkat I Sulawesi Selatan untuk periode tahun 1995 - 1999 yaitu pada tahun 1995 jumlah investasi yang dilakukan oleh PMDN di Sulawesi Selatan sebanyak 13 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 42.804.388.024,- di tahun 1996 jumlah investasi yang dila-

kukan FMDN tidak mengalami peningkatan di mana unit usaha tetap berjumlah 13 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 42.804.388.024,-. Pada tahun 1997 jumlah investasi oleh FMDN mengalami peningkatan sebesar 30,77 % atau mencapai 17 unit usaha dsengan jumlah investasi juga mengalami peningkatan sebesar 32,66 % atau mencapai nilai sebesar Rp. 56.784.233.450,-. Pada tahun 1998 baik jumlah unit usaha FMDN dan nilai investasinya tidak mengalami perubahan atau peningkatan yang besarnya sama dengan tahun sebelumnya. namun pada tahun 1999 jumlah investasi yang dilakukan oleh investor FMDN mengalami penurunan, di mana jumlah unit usaha yang ada sebanyak 15 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp. 43.189.415.040,- atau menurun sebesar -11,76 % dan -23,94 %.

#### 4.4. Tingkat Produktivitas Usaha PMDN dan PMA

Unit usaha yang dilakukan baik oleh PMDN dan PMA umumnya bergerak pada sektor-sektor industri dan pabrikasi yang cenderung menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat. Olehnya itu pada sektor produktif unit usaha industri tersebut merupakan mekanisme perangsang pembangunan yang tercipta sebagai akibat dari terdapatnya hubungan diantara berbagai industri dalam menyediakan barang-barang yang digunakan sebagai bahan mentah dalam industri lainnya, dapat dibedakan dalam dua golongan yaitu "pengaruh hubungan ke belakang" dan pengaruh hubungan ke depan". Yang dimaksud

dengan pengaruh hubungan ke belakang adalah tingkat rangsangan yang diciptakan oleh pengembangan sesuatu industri terhadap perkembangan industri-industri yang akan menyediakan bahan mentah (input) kepada industri tersebut, dan yang dimaksud dengan pengaruh hubungan dengan ke depan adalah tingkat rangsangan yang diciptakan oleh pengembangan sesuatu industri terhadap perkembangan industri-industri yang menggunakan produksi industri yang pertama sebagai bahan mentah mereka.

Jadi besarnya tingkat hubungan di antara sesuatu industri dengan industri lainnya, sehingga industri ini dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu : industri karung semen dan industri batu bata yang juga bagian dari industri satelit dan industri semen. Sedangkan industri bukan satelit adalah industri karung goni dalam hubungannya dengan industri karung semen. Untuk menentukan apakah sesuatu industri merupakan industri satelit atau bukan terhadap sesuatu jenis industri utama, perlulah ditentukan sampai dimana eratnya hubungan sesuatu industri dengan industri kainnya. Sesuatu industri dapat digolongkan sebagai industri-industri satelit apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Lokasi yang berdekatan dengan industri induk akan sangat mempertinggi efisiensi kegiatannya.
2. Industri-industri tersebut menggunakan sebagai input utamanya hasil industri induk atau industri tersebut menghasilkan barang yang merupakan input dan industri

induk tetapi bukan merupakan input yang terutama.

3. Biasanya industri tersebut tidak melebihi besarnya industri induk.

Hubungan berbagai industri dan pengaruhnya dari berbagai corak hubungan tersebut pada pembangunan, perlu diperhatikan potensi keuntungan dari hubungan yang erat dari berbagai industri, terutama yang berkaitan dengan potensi keuntungan di dalam ekonomi ektern. Disamping itu diketahui pada ekonomi ektern akan tercipta berbagai industri yang mempunyai hubungan yang erat terutama yang berkaitan dengan proses produksi.

Olehnya itu di negara yang sedang berkembang sangat penting untuk membangun sektor industri barang setengah jadi yang mempunyai kemampuan paling besar untuk mendorong peningkatan penanaman modal dan produksi pada sektor-sektor lainnya. Untuk itu industri-industri pada sektor barang setengah jadi dapat dibedakan dalam :

1. Industri yang memperoleh hasil-hasil industri primer di dalam negeri, atau yang diimpor menjadi barang-barang jadi
2. Industri yang memproses barang-barang setengah jadi menjadi barang-barang jadi. Industri barang konsumsi jenis kedua ini sangat penting peranannya dalam mengembangkan produksi industri-industri yang investasinya berasal dari PMA, maka ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4  
 PRODUKSI INDUSTRI-INDUSTRI PMA DI DAERAH TINGKAT I  
 SULAWESI SELATAN PERIODE 1995 - 1999

Tahun	Total Pro- duksi(unit)	Kenaikan (%)	Nilai Produksi (Rp)	Kenaikan (%)
1995	40.293	-	18.291.350.290	-
1996	45.634	13,26	22.015.409.200	20,36
1997	53.921	18,16	29.121.805.500	32,28
1998	31.214	-42,11	16.255.760.800	-44,18
1999	35.299	13,09	17.165.025.700	5,59

Sumber Data : Kantor Departemen Perindustrian dan Perdag-  
 angan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data dari tabel 4 di atas, maka dapat kita ketahui perkembangan hasil produksi industri-industri yang modalnya berasal dari investasi PMA di Sulawesi Selatan pada priode tahun 1995 - 1999. Di mana pada tahun 1995 jumlah produksi industri yang diinvestasinya dilakukan oleh PMA sebesar 40.293 unit dan nilai produksinya sebesar Rp. 18.291.350.290. Di tahun 1996 jumlah produksi dari indus-  
 tri-industri tersebut mengalami peningkatan sebesar 13,26% atau mencapai jumlah 45.634 unit dengan nilai produksinya mencapai Rp. 22.015.409.200 atau mengalami peningkatan sebesar 20,36%. Kemudian pada tahun 1997 jumlah produksi dan nilai produksidari industri yang dari investasinya berasal dari PMA masing-masing mengalami peningkatan sebe-  
 sar Rp. 29.121.805.500. Sedangkan pada tahun 1988, baik dari jumlah yang diproduksi oleh industri-industri PMA mengalami penurunan, dimana jumlah produksi dan nilai

produksinya hanya masing-masing mencapai jumlah sebesar 31.241 unit dan sebesar Rp. 16.255.760.800 atau mengalami penurunan -42,11% dan -44,18%. Penurunan ini dikaitkan dari dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia, khususnya. Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, yang mengakibatkan industri-industri yang investasinya berasal dari PMA mengalami penurunan dalam memproduksi barang. Namun pada tahun 1999, jumlah produksi dan nilai produksi yang dihasilkan industri-industri PMA mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana masing-masing mengalami peningkatan sebesar 13,09% dan 5,59% atau mencapai jumlah sebesar 35.299 unit dan nilainya sebesar Rp. 17.165.025.700.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat produksi dari industri-industri yang investasinya berasal dari PMDN dari tahun 1995-1999, maka hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

TABEL 5  
PRODUKSI INDUSTRI-INDUSTRI PMDN DI DAERAH TINGKAT I  
SULAWESI SELATAN PERIODE 1995 - 1999

Tahun	Total Pro- duksi(unit)	Kenaikan (%)	Nilai Produksi (Rp)	Kenaikan (%)
1995	38.840	-	16.354.620.000	-
1996	39.254	1,07	16.915.750.500	3,43
1997	42.128	7,32	18.218.344.450	7,70
1998	43.248	2,66	18.918.384.450	3,84
1999	40.425	-6,53	17.121.415.200	-9,50

Sumber Dara : Kantor Departem Perindustrian dan Perda-  
gangan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan dari data tabel 5 di atas, maka kita dapat mengetahui perkembangan proses produksi barang industri-industri PMDN yang berada di Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ditinjau dari segi total produksinya maupun nilai produksinya dari tahun 1995-1999 sebagai berikut :

Pada tahun 1995 jumlah produksi industri-industri PMDN di Sulawesi Selatan mencapai 38.840 unit sedangkan nilainya mencapai Rp. 16.354.620.000, dan pada tahun 1996 baik dari jumlah produksi maupun nilai produksi industri - industri PMDN tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,07% dan 3,43% atau mencapai jumlah sebesar 39.254 unit dan nilai produksi sebesar Rp. 16.915.750.500. Sedangkan pada tahun 1997 masing-masing mengalami kenaikan sebesar 7,32% dan 7,70% atau mencapai jumlah sebesar 42.128 unit dan nilai sebesar Rp. 18.218.344.450. Ditahun 1998 jumlah produksi industri-industri PMDN juga mengalami peningkatan sebesar 2,66% atau mencapai jumlah sebesar 43.248 unit dan nilai produksinya mencapai Rp. 18.918.384.450 atau meningkat sebesar 3,84%. Dan pada tahun 1999 jumlah produksi industri-industri PMDN sebesar -6,53% atau menurun menjadi 40.425 unit dari tahun sebelumnya. Sedangkan nilai produksinya juga menurun menjadi Rp. 17.121.415.200 atau -9,50%.

#### 4.5. Hubungan Antara Tingkat PMA dan PMDN Dengan PDRB Sulawesi Selatan

Pengarahaan kegiatan perusahaan multinasional yang modalnya berasal dari PMA dan PMDN harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional. Pertama-tama perlu disadari adanya pertentangan kepentingan antara negara atau daerah penerima modal dengan perusahaan yang investasinya melalui kedua jenis penanaman modal tersebut, dan lanjutnya diharapkan adanya satu kerja sama antara kedua pihak. Olehnya itu prinsip keseimbangan perlu diusahakan agar kedua kepentingan tersebut dapat dipenuhi secara seimbang pula.

Di dalam menciptakan keseimbangan seperti yang dimaksudkan perlu pula disadari karena adanya perkembangan yang saling memacu antara usaha kegiatan perusahaan multinasional di satu pihak dengan pengaturan dan kebijaksanaan dari negara/daerah penerima modal dilain pihak. Usaha mengejar kepentingan demikian diselenggarakan dengan upayah dan kekuatan masing-masing, dimana dapat kita lihat terjadinya pergeseran-pergeseran kekuatan antara negara/daerah dengan perubahan.

Sehubungan dengan hal ini kita tidak dapat tinggal diam, sebab dengan tinggal diam kita akan tinggalkan dalam berpacu dengan negara-negara lain dan dengan perusahaan multinasional. Analisa secara umum menunjukkan bahwa proses perkembangan secara global menguntungkan pihak negara/daerah penerima modal ini digambarkan dan meningkatkan

kemampuan negara/daerah penerima modal dalam mengelola perjanjian-perjanjian dengan pihak investor atau dalam memberikan perizinan pada perusahaan baik investasi dari PMA dan PMDN dengan persyaratan-persyaratan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang semakin mantap. Penyelenggaraan renegotiasi dan nasionalisasi secara menyeluruh telah dapat meningkatkan pembagian hasil yang diperoleh negara penerima modal. Dalam rangka ini ada dua faktor yang penting untuk diperhatikan yaitu:

1. Adanya usaha perbaikan iklim penanaman modal dan partisipasi dunia kedua (negara-negara yang sedang berkembang) dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
2. Adanya peningkatan kemampuan berunding dari negara penerima modal.
3. Munculnya kekuatan-kekuatan industri baru yang berdiri sendiri yang dapat mengurangi supremasi dari perusahaan-perusahaan yang menguasai komponen-komponen komoditi.

Disamping itu juga perlu memperhatikan perkembangan teknologi yang telah dapat mempercepat hubungan antara negara yang merupakan kesempatan untuk memperkuat posisi bagi mereka yang dapat memanfaatkannya. Hal yang terakhir ini biasanya lebih dapat dinikmati oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

Pokok pertimbangan pengaturan tersebut perlu diperhatikan bahwa kehadiran perusahaan multinasional di Indonesia diharapkan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

dan tentunya secara implisit berarti kepada perusahaan tersebut diberi kesempatan untuk melakukan usaha dan memperoleh keuntungan. Sedangkan bagi negara yang sedang berkembang, penerimaan modal mengharapkan perusahaan dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut berperan dalam pembangunan nasional, sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Peranan berbagai ketentuan hukum sebagai mana termuat dalam berbagai macam kebijaksanaan dapat merupakan kekuatan bagi negara/daerah penerima modal terhadap perusahaan multinasional. Beberapa ketentuan yang dimaksudkan tersebut adalah:

- Usaha untuk mengadakan peningkatan produksi
- Adanya peningkatan volume ekspor.
- Persyaratan penyebaran kegiatan usaha ke daerah.
- Penciptaan lapangan kerja
- Adanya perluasan pasar
- Peningkatan pendapatan negara dari pajak.

Keseluruhan kebijaksanaan tersebut pada umumnya telah dituangkan dalam GBHN dan kebijaksanaan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat menjadi bahan pengarah kegiatan perusahaan multinasional sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Bagi negara sedang berkembang pada umumnya, termasuk Indonesia penerapan prioritas pembangunan nasional telah merupakan pokok/pangkal dalam menetapkan posisi dan prospek pembagian penghasilan dari kegiatan perusahaan PMA dan PMDN tersebut. Olehnya itu

pendekatan-pendekatan dengan serangkaian peraturan hukum yang mengatur perihal ini perlu diselenggarakan secara mantap dan efektif.

Untuk itu perlu kita ketahui perkembangan PDRB daerah Sulawesi Selatan, terutama guna mengetahui hubungan antara kegiatan PMA dan PMDN yang berkaitan dengan proses produksi dari industri-industri yang dimaksud dan peningkatan dengan proses produksi dari industri-industri yang dimaksud dan peningkatan PDRB yang dihasilkan di Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Hal mengenai perkembangan PDRB Sulawesi Selatan sesuai dengan tahun penelitian, dapat kita ketahui pada tabel berikut ini :

TABEL 6  
PERKEMBANGAN PDRB SULAWESI SELATAN  
PERIODE 1995 - 1999

Tahun	P D R B (Rp)	Perkembangan (%)
1995	61.372.320.100	-
1996	71.833.180.850	17,04
1997	83.538.850.150	16,30
1998	89.645.240.350	7,31
1999	94.122.310.400	4,99

Sumber Data : Kantor Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Berdasarkan dari tabel 6 di atas, maka dapat kita ketahui perkembangan PDRB Sulawesi Selatan pada periode tahun 1995-1999 sebagai berikut : Pada tahun 1995 jumlah

PDRB Sulawesi Selatan mencapai nilai sebesar Rp. 61.372.320.100 dan pada tahun 1996 mengalami peningkatan sebesar Rp. 71.833.180.850 atau 17,04%. Kemudian pada tahun 1997 jumlah PDRB Sulawesi Selatan ini juga mengalami peningkatan, apabila kita membandingkan dengan PDRB yang dihasilkan Sulawesi Selatan pada tahun sebelumnya. Di mana jumlah PDRB daerah ini mencapai sebesar Rp. 83.538.850.150 atau 16,30 %.

Demikian pula pada tahun 1998 jumlah PDRB daerah Sulawesi Selatan tetap mengalami peningkatan, di mana jumlah PDRB daerah Sulawesi selatan tetap mengalami peningkatan, di mana jumlah PDRB daerah ini mencapai nilai sebesar Rp. 89.645.240.350 atau 7,31 %. Sedangkan pada tahun 1999 PDRB yang dihasilkan daerah Sulawesi Selatan tetap mengalami peningkatan, hal ini dapat kita lihat bahwa PDRB yang dihasilkan daerah ini dapat mencapai nilai sebesar Rp. 94.122.310.400 atau 4,99 %.

Dengan adanya perkembangan tingkat investasi yang dilakukan oleh pihak PMA maupun PMDN tersebut akan mempengaruhi perkembangan PDRB yang dihasilkan di Sulawesi Selatan. Terlebih lagi daerah Sulawesi Selatan telah menyiapkan berbagai fasilitas yang dapat digunakan para penanam modal yang ingin melakukan investasi di daerah itu.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa perkembangan tingkat investasi yang dilakukan oleh pihak PMA maupun PMDN di daerah Sulawesi Selatan sebagai akibat dari

adanya dukungan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti : adanya kebijaksanaan/peraturan yang diterapkan oleh pemerintah yang dapat memberikan kelonggaran bagi penanaman modal, serta tersedianya fasilitas - fasilitas yang cukup memadai guna menunjang kegiatan investasi tersebut.

Dengan adanya peningkatan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak investor, baik yang berasal dari negara lain maupun yang berasal dari dalam negeri, akan berdampak pada perkembangan dan peningkatan PDRB yang dihasilkan oleh Daerah Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir.

Setelah mengetahui perkembangan dari pada tingkat investasi yang dilakukan baik oleh PMA maupun PMDN di Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, maka berikut ini penulis akan menjelaskan bagaimana hubungan dari pada tingkat investasi PMA dan PMDN terhadap peningkatan PDRB Sulawesi Selatan dengan melihat hasil produk yang ada. Adapun alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari pada investasi PMA dan PMDN tersebut yaitu dengan menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda, di mana variabel  $Y$  sebagai variabel dependen yaitu PDRB dan variabel  $X_1$  (PMDN) dan variabel  $X_2$  (PMA) sebagai variabel independen.

Berdasarkan dari tabel 1 dan 6, dapat dianalisis melalui komputer dimana hasil yang diperoleh dari pengolahan data dengan formulasi Regresi Linier berganda sebagaimana persamaan dasar yang dijelaskan pada Bab III yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 88.534.231.729,6360 + 0,6974X_1 + 1,2072X_2$$

Persamaan Regresi Linier Berganda tersebut menjelaskan bahwa apabila terjadi perubahan pada jumlah investasi yang dilakukan oleh PMDN ( $X_1$ ) atau perubahannya sebanyak satu (1) milyar saja, maka akan berdampak pada adanya perubahan pada PDRB yang dihasilkan oleh daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sebanyak Rp 6,974 milyar. Kenyataan tersebut ditandai dengan besarnya koefisien perubahan jumlah investasi PMDN sebagaimana ditunjukkan dengan bilangan yang mewakili  $b_1 = 0,6974$ . Sedangkan pengaruh perubahan jumlah investasi PMA ( $X_2$ ) terhadap jumlah PDRB Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dapat dijelaskan dengan nilai koefisien regresi variabel jumlah investasi PMA ( $X_2$ ). Di mana dalam persamaan di atas, koefisien regresi untuk pengaruh investasi PMA terhadap perubahan jumlah PDRB Sulawesi Selatan adalah  $b_2 = 1,2072$ . Artinya bila terjadi perubahan pada jumlah investasi oleh PMA sebanyak (1) milyar saja maka hal tersebut akan berdampak pada adanya perubahan pada jumlah PDRB yang dihasilkan oleh daerah Sulawesi Selatan sebanyak Rp 12,072 milyar.

Diketahui juga bahwa nilai koefisien varians dari persamaan hubungan antara jumlah investasi PMDN ( $X_1$ ) dan jumlah investasi PMA ( $X_2$ ) terhadap PDRB Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan adalah sebesar 1,536. Jadi F hitung = 1,536. Jika kita bandingkan dengan F Tabel pada tingkat

keyakinan 5% ( $\alpha = 0,05$ ), yakni  $F_{0,05} = 1,09$ . Ini berarti bahwa  $F$  hitung lebih besar dari pada  $F$  tabel. Karena  $F$  hitung lebih besar dari pada  $F$  tabel berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya variabel bebas yakni jumlah investasi PMDN ( $X_1$ ) dan jumlah investasi PMA ( $X_2$ ) faktor yang mendukung peningkatan PDRB daerah Tingkat I Sulawesi Selatan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan atau berpengaruh nyata terhadap perubahan jumlah PDRB daerah ini.

Sedangkan nilai koefisien varians dari persamaan korelasi antara jumlah investasi PMDN ( $X_1$ ) dan jumlah investasi PMA ( $X_2$ ) terhadap PDRB Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan adalah sebesar 0,885 dan 1,415. Jika kita bandingkan dengan tabel  $T$  pada tingkat keyakinan 5% ( $\alpha = 0,05$ ) = 4,303. Ini artinya  $T$  hitung lebih besar daripada  $T$  tabel. Dengan demikian, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti kedua variabel bebas yakni PMDN ( $X_1$ ) dan PMA ( $X_2$ ) secara bersama-sama mempunyai pengaruh secara signifikan atau berpengaruh nyata terhadap perubahan jumlah PDRB yang dihasilkan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Kenyataan besarnya pengaruh variabel bebas, ( $X_1$ ) dan  $X_2$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ ) nampak juga berdasarkan pada nilai koefisien  $R$ , dari persamaan yang telah diketahui bahwa nilai koefisien determinasi  $R = 0,6057$ . Artinya sebesar 60,57% perubahan jumlah PDRB Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh sejumlah investasi PMDN

( $X_1$ ) dan jumlah investasi PMA ( $X_2$ ). Pengaruh faktor lain yang tidak diteliti sangat kecil, yakni sebesar 39,43%.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan usaha PMA dan PMDN di Sulawesi Selatan sangatlah berperan dalam meningkatkan hasil produk domestik regional bruto di daerah ini, di mana industri-industri yang investasinya berasal dari 2 jenis penanaman modal ini mampu memanfaatkan subur daya alam yang dimiliki daerah ini sebagai bahan baku. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan investasi PMA di Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan dari tahun 1995 sampai tahun 1997, tetapi pada tahun 1998 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya gejolak krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia. Kemudian pada tahun 1999 PMA kembali meningkat dari tahun 1998. Sedangkan untuk investasi PMDN, pada tahun 1995 dan 1996 terjadi penanaman modal sebanyak 13 unit dan pada tahun 1998 terjadi penanaman modal sebanyak 17 unit, tetapi pada tahun 1999 menurun menjadi 15 unit dari tahun sebelumnya.
2. Perkembangan PDRB Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tidak terlepas dari pengaruh perkembangan produksi

industri - industri baik yang investasinya berasal dari PMA maupun PMDN. Di mana selama 5 tahun terakhir ini perkembangan produksi dari kedua jenis investasi tersebut mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat diketahui dengan melihat tabel 4 dan 5, yang menyangkut perkembangan produksi dan nilainya dari industri-industri yang investasinya berasal dari PMA dan PMDN.

3. Sedangkan untuk melihat antara konkret mengenai pengaruh PMA dan PMDN terhadap peningkatan PDRB di Sulawesi Selatan, sesuai dengan hasil analisa Regresi Linier Berganda diperoleh hasil yaitu :

$$Y = 88.534.231.729,6360 + 0,6974 X_1 + 1,2072 X_2.$$

Dari persamaan tersebut nampak bahwa variabel bebas yakni jumlah PMA dari jumlah PMDN sebagaimana faktor pendukung meningkat PDRB secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan jumlah PDRB di Sulawesi Selatan atau korelasi dari variabel bebas ( $X_1$  dan  $X_2$ ) terhadap variabel Y diperoleh hasil nilai  $R = 0,6057$ . Ini berarti bahwa pengaruh dari tingkat PMA dan PMDN terhadap peningkatan PDRB Sulawesi Selatan cukup besar pengaruhnya, dengan tingkat keeratan mencapai 60,57%.

## 5.2. Saran -Saran

Adapun mengenai saran yang dapat penulis berikan antara lain :

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, disarankan kepada pemerintah daerah setempat bersama BKPM Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan pada tahun tahun mendatang untuk menerapkan dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Terutama dalam membebani prasarana dan sarana pendukung yang dapat dimanfaatkan baik oleh investor yang sudah menanamkan modalnya di daerah Sulawesi selatan.

Hendak pula didasari oleh semua pihak baik pemerintah, BKPM maupun masyarakat untuk dapat lebih menyiapkan, untuk dapat lebih diri dari siap menerima investor yang akan menanamkan modalnya di daerah ini. Sehingga mampu lebih meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Alam B. Murtoy, 1993, Industrialisasi Negara Maju dan Negara Dunia Ketiga, Edisi Keenam, Jakarta.
2. Rustian Kamaluddin, 1998, Pengantar Ekonomi Pembangunan, Analisis Beberapa Aspek Kebijakan Nasional, LPFE UI, Jakarta.
3. Said Kelana, 1997, Teori Ekonomi Makro, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
4. Irawan dan M. Suparmoko, 1995, Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima, BPFE UGM, Yogyakarta.
5. Richard A. Bilas, 1992, Ekonomi Mikro, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
6. Rudiger Roonbusch dan Stanley Fischer, 1997, Ekonomi Makro, Edisi Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
7. Syamsuddin Jafar, 1993, Ekonomi Moneter, Kota Kembang, Yogyakarta.
8. Supranto J, 1983, Ekonometrika, Edisi Kedua, LPFE UI, Jakarta.
9. Sumantoro, 1992, Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal, PT. Bina Cipta, Jakarta.
10. H.G. Suseno Trianto, 1995, Indikator Ekonomi, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
11. Prawirawidjaya, R.A. Rahman, 1990, Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal, Penerbit Alumni, Bandung.
12. Zulkarnain Djamil, 1991, Perekonomian Indonesia, LP3ES, Jakarta.

LAMPIRAN 1

DATA UNTUK DIREGRESI

Tahun	PDRB (Y)	PMDN (X1)	PMA (X2)
1995	61.372.320.100	42.804.388.024	38.231.456.980
1996	71.833.180.850	42.804.388.024	39.950.801.825
1997	83.538.850.150	56.784.233.450	41.850.021.560
1998	89.645.240.350	56.784.233.450	26.760.261.410
1999	94.122.310.400	43.189.415.040	28.145.351.890

----- REGRESSION ANALYSIS -----

DATA FOR : B: DATA LABEL: ANALISIS REGRESI  
 OF CASES : 5 NUMBER OF VARIABLES: 3

NAME	MEAN	STD.DEV.
X1	48473277596.0000	7588455859.6169
X2	34987578734.0000	7013456167.4362
R.: Y	80102380370.0000	13403625979.6770

NT VARIABLE: Y

REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 2)	PROB.	PARTIAL r^2
.6974	.7884	.885	.46969	.2812
1.2072	.8530	1.415	.29264	.5004
T 88534231729.6360				

ROR OF EST. = 11902329900.2240

D R SQUARED = .2115  
 R SQUARED = .6057  
 MULTIPLE R = .7783

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB
ION	4.35298E+20	2	2.17649E+20	1.536	.3943
L	2.83331E+20	2	1.41665E+20		
	7.18629E+20	4			

OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL	STANDARDIZED RESIDUALS
6.1372E+107	2.233E+10	-1.0861E+10	-2.0 *
7.1833E+107	0.158E+10	1.67555E+09	0 *
3.3539E+107	7.614E+10	5.92474E+09	0 *
3.9645E+109	5.830E+10	-6.18417E+09	0 *
9.4122E+108	4.677E+10	9.44524E+09	0 *